



# RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

(RENSTRA PERUBAHAN)

TAHUN 2021-2026

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SUMBAWA**



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 76 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan rencana strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan perubahan rencana pembangunan lima tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan/atau kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah berkenaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 440);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569)
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 712);

31. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 66 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa  
pada tanggal 29 September 2023



Diundangkan di Sumbawa  
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 54 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR  
76 TAHUN 2021 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI  
USAHA KECIL MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN  
2021-2026**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Ketentuan Pasal 29 Ayat (1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja. Pada Pasal 30 Ayat (1) dalam regulasi yang sama seperti di atas, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renstra dapat diubah jika RPJMD mengalami perubahan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 11 dijelaskan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan rencana Perangkat Daerah, terdiri atas: Renstra Perangkat Daerah; dan Renja Perangkat Daerah. Pada Pasal 13, selanjutnya disebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan,

sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, sedangkan Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Menurut ketentuan Pasal 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa perangkat Daerah melakukan penyusunan renstra perangkat daerah dan renja perangkat daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dimaksud, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan yang terkait. Pasal 16 Ayat (2) selanjutnya menyebutkan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun secara bertahap, yang dimulai dengan (a) persiapan penyusunan; (b) penyusunan rancangan awal; (c) penyusunan rancangan; (d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (e) perumusan rancangan akhir; dan (f) penetapan.

Pada Bagian Keenam Paragraf 1 Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan secara detail bagaimana proses penyusunan renstra perangkat daerah, sebagai berikut:

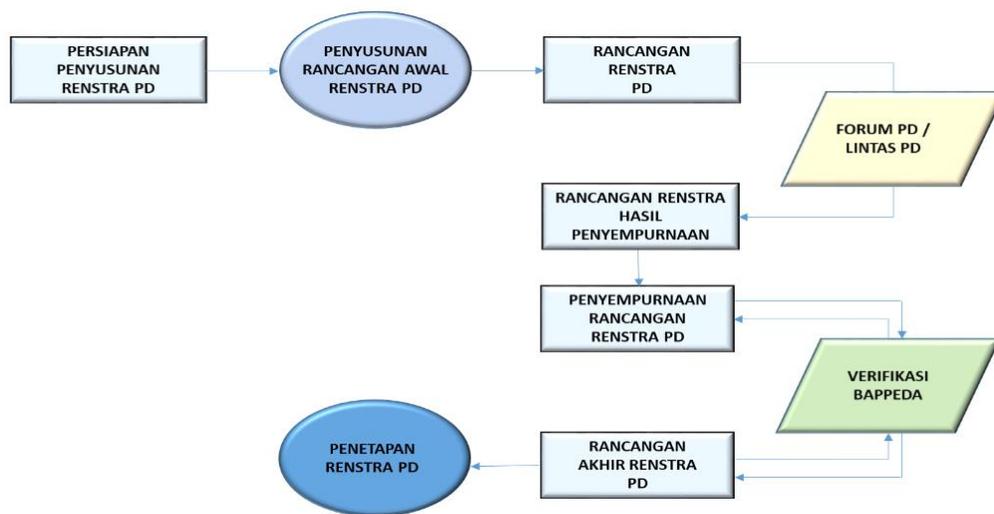
<p>Persiapan Penyusunan Renstra</p>	<p>a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra OPD;</p> <p>b. pembentukan tim penyusun Renstra OPD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra OPD. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf OPD bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan</p>	<p>a. Tim penyusun Renstra OPD dipersiapkan oleh Kepala OPD dan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.</p> <p>b. Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra OPD yang ditetapkan dengan keputusan Bupati sekurang-kurangnya: Ketua (Kepala OPD), Sekretaris (Sekretaris OPD), Pokja (d disesuaikan dengan kebutuhan (pejabat/staf OPD</p>
-------------------------------------	--	---

	<p>dan penganggaran.</p> <p>c. orientasi mengenai Renstra OPD; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra OPD;</p> <p>d. Tim penyusun Renstra OPD bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana OPD.</p> <p>e. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.</p>	<p>dan unsur pemerintah/non pemerintah yang dinilai kompeten sebagai tenaga ahli).</p> <p>c. Tujuan orientasi adalah untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan renbang nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi renbang daerah yang diperlukan dalam Menyusun dokumen renbang daerah.</p> <p>d. Bahan orientasi mengenai dokumen renbang daerah dan dokumen rencana OPD, mencakup: (1) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan renbang dan penganggaran daerah; (2) Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan dokumen renbang daerah dan dokumen rencana OPD; dan (3) Buku-buku literatur tentang renbang dan penganggaran daerah.</p>
Penyusunan Ranwal Renstra OPD	<p>a. analisis gambaran pelayanan;</p> <p>b. analisis permasalahan;</p> <p>c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;</p> <p>d. analisis isu strategis;</p> <p>e. perumusan tujuan dan sasaran OPD berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;</p> <p>f. perumusan strategi dan arah kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target</p>	<p>a. Penyusunan ranwal Renstra OPD dilakukan bersamaan dengan penyusunan ranwal RPJMD;</p> <p>b. Penyusunan ranwal Renstra OPD, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: pendahuluan; gambaran pelayanan OPD; permasalahan dan isu strategis OPD; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan;</p>

	<p>kinerja OPD; dan</p> <p>g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan OPD serta program dan pagu indikatif dalam ranwal RPJMD.</p>	<p>rencana program dan kegiatan serta pendanaan; kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan</p> <p>c. penutup.</p>
<p>Pelaksanaan Forum OPD/ Lintas OPD</p>	<p>a. Forum OPD/lintas OPD dilaksanakan oleh kepala OPD berkoordinasi dengan BAPPEDA.</p> <p>b. Forum OPD/lintas OPD dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD.</p> <p>c. Forum OPD/lintas OPD bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra OPD.</p> <p>d. Forum OPD/lintas OPD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima.</p>	<p>a. Hasil pelaksanaan forum OPD/lintas OPD dirumuskan dalam BA kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum OPD/lintas OPD.</p>
<p>Perumusan Rancangan Akhir Renstra OPD</p>	<p>a. Perumusan rancangan akhir Renstra OPD, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra OPD menjadi rancangan akhir Renstra OPD berdasarkan Perda tentang RPJMD.</p> <p>b. Perumusan rancangan akhir Renstra OPD, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.</p> <p>c. Rancangan akhir Renstra OPD disajikan sesuai dengan sistematika.</p>	

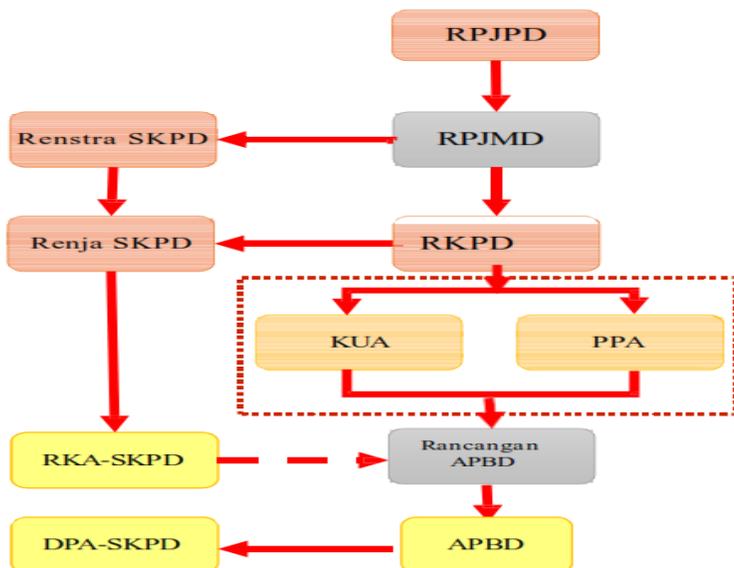
<p>Penetapan Renstra OPD</p>	<p>a. Rancangan akhir Renstra OPD, disampaikan kepala OPD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.</p> <p>b. Apabila hasil verifikasi, ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra OPD kepada kepala OPD.</p> <p>c. Verifikasi rancangan akhir Renstra OPD paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra OPD.</p> <p>d. Rancangan akhir Renstra OPD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala OPD kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra OPD.</p> <p>e. Rancangan akhir Renstra OPD, disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.</p>	<p>a. Verifikasi, harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan OPD dalam Renstra OPD selaras dengan Perda tentang RPJMD.</p> <p>b. Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala OPD menyempurnakan rancangan akhir Renstra OPD.</p> <p>c. BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir Renstra OPD yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekda untuk ditetapkan dengan Perbup.</p> <p>d. Penetapan Renstra OPD dengan Perbup, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.</p> <p>e. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perbup menjadi pedoman kepala OPD dalam menyusun Renja OPD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPd.</p>
------------------------------	--	--

Seluruh proses penyusunan renstra perangkat daerah sebagaimana disajikan di atas, dapat digambarkan seperti di bawah ini:

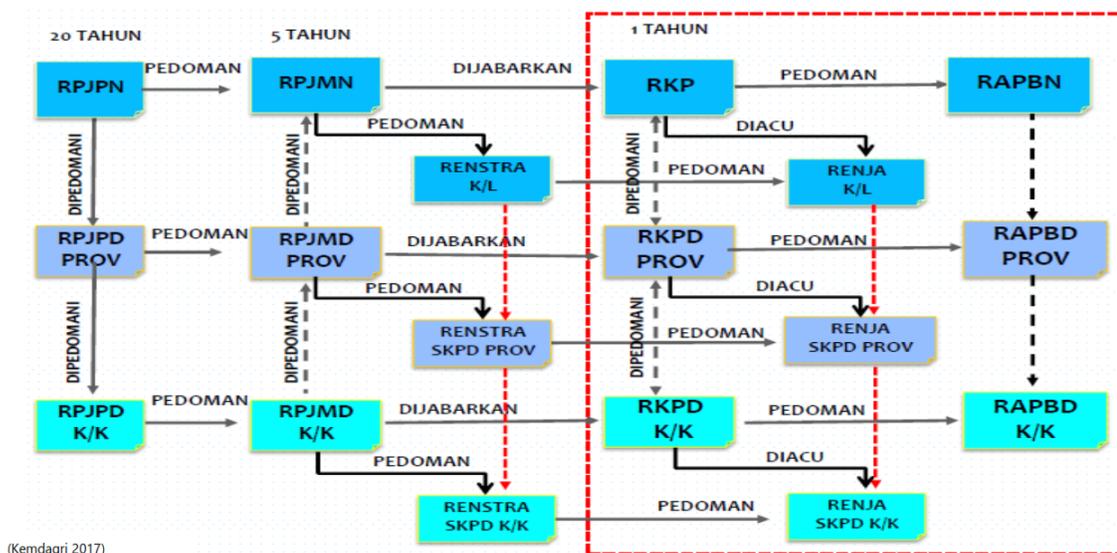


Dokumen renstra perangkat daerah memiliki hubungan dan keterkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dalam perangkat daerah itu sendiri, terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah

kabupaten, terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan provinsi, serta terkait dengan proses perencanaan pembangunan secara nasional yang dilakukan oleh K/L teknis terkait. Maka renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah, akan terkait dengan renja perangkat daerah itu sendiri, terkait juga dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah kabupaten berupa RPJMD dan RPJPD, dapat digambarkan secara visual seperti gambar di bawah ini:



Hubungan antara dokumen resntra perangkat daerah dengan dokumen perencanaan dilura pemerintah daerah, yaitu renstra perangkat daerah terkait di provinsi maupun renstra K/L dapat digambarkan secara visual seperti gambar di bawah ini:



(Kemdagri 2017)

## **1.2. Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

- Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
  22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
  23. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
  24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
  25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 697).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra perangkat daerah ini secara *de jure* memiliki maksud dan tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif, serta akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah itu sendiri untuk penyusunan renja perangkat daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa ini disusun berdasarkan tata urutan atau sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUMBAWA**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa
- 2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sumbawa
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

##### **BAB V SETRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL**  
**MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN SUMBAWA**

Bab ini menjelaskan jenis dan hasil pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa dari masing-masing bidang yang telah dicapai selama kurun waktu tertentu disertai dengan kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan pelayanan tersebut. Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa**

**2.1.1. Tugas dan Fungsi**

Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Peraturan daerah tersebut di atas merupakan amanat atau turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pada tingkatan lebih tinggi, keberadaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terbentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan memiliki hubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Struktur Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa terbentuk mengikuti Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 26 Tahun 2022, bahwa kedudukan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayan dasar, yaitu urusan wajib bidang koperasi usaha kecil dan menengah, dan urusan pemerintah pilihan bidang perindustrian serta urusan pemerintah pilihan bidang perdagangan dan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Koperasi Usah Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, maka Dinas Koperasi Usah Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa mempunyai kedudukan :

- 1) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- 3) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut:

- (1) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan penyelenggaraan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintah di bidang Pembinaan Koperasi, Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, Pengawasan Koperasi serta Kesekretariatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. Perumusan kebijakan strategi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
  - b. Pelaksanaan kebijakan strategi di bidang Koperasi Usaha kecil dan Menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang.

Adapun Tugas dan Fungsi masing-masing Struktur adalah sebagai berikut:

Tabel : II.1  
Tugas dan Fungsi Jabatan

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
1.	Kepala Dinas	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Menyusun perencanaan di bidang koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian, perdagangan dan pasar;</li> <li>~ Memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian, perdagangan dan pasar;</li> <li>~ Mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian, perdagangan dan pasar;</li> <li>~ Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan pasar;</li> <li>~ Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian, perdagangan dan pasar;</li> <li>~ Melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian, perdagangan dan pasar, serta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian, perdagangan dan pasar;</li> <li>~ Pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian, perdagangan dan pasar; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
		pembinaan terhadap UPT Dinas; ~ Melaksanakan administrasi/penatausahaan Dinas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
2.	Sekretaris Dinas	~ Merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; ~ Mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; ~ Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan ~ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	~ Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan; ~ Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; ~ Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; ~ Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; ~ Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan ~ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6.	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	~ Merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis pengawasan dan pemberdayaan koperasi, pengembangan usaha dan sumber daya manusia koperasi,	~ Penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan pemberdayaan koperasi, pengembangan usaha

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
		<p>pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah;</p> <p>~ Memimpin pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemberdayaan koperasi, pengembangan usaha dan sumber daya manusia koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah;</p> <p>~ Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan dan pemberdayaan koperasi, pengembangan usaha dan sumber daya manusia koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah;</p> <p>~ Melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan dan pemberdayaan koperasi, pengembangan usaha dan sumber daya manusia koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah; dan</p> <p>~ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	<p>dan sumber daya manusia koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah;</p> <p>~ Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah; dan</p> <p>~ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
10.	Kepala Bidang Perindustrian	<p>~ Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan industri, pembangunan industri dan pengendalian izin usaha industri;</p> <p>~ Memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan industri, pembangunan industri dan pengendalian izin usaha industri;</p> <p>~ Memimpin pelaksanaan kegiatan perencanaan industri, pembangunan industri dan pengendalian izin usaha industri;</p> <p>~ Mengoordinasikan pelaksanaan</p>	<p>~ Penyusunan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perindustrian;</p> <p>~ Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan industri, pembangunan industri dan pengendalian izin usaha industri; dan</p> <p>~ Pelaksanaan fungsi lain</p>

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
		<p>program dan kegiatan pelaksanaan perencanaan industri, pembangunan industri dan pengendalian izin usaha industri;</p> <p>~ Melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan perencanaan industri, pembangunan industri dan pengendalian izin usaha industri; dan</p> <p>~ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>	<p>yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
13.	Kepala Bidang Perdagangan	<p>~ Merumuskan kebijakan teknis di bidang perdagangan termasuk bahan pokok, barang penting, perdagangan dalam dan luar negeri;</p> <p>~ Memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang perdagangan termasuk barang kebutuhan pokok, barang penting, sarana prasarana perdagangan, perdagangan dalam dan luar negeri;</p> <p>~ Memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan termasuk barang kebutuhan pokok, barang penting, sarana prasarana perdagangan, perdagangan dalam dan luar negeri;</p> <p>~ Memberikan rekomendasi teknis izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan berjejaring nasional;</p> <p>~ Memberikan rekomendasi untuk syarat penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C;</p> <p>~ Melaksanakan penerbitan surat keterangan asal bagi daerah yang</p>	<p>~ Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan;</p> <p>~ Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan termasuk barang kebutuhan pokok, barang penting, sarana prasarana perdagangan, perdagangan dalam dan luar negeri;</p> <p>~ Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan termasuk barang kebutuhan pokok, barang penting, sarana prasarana perdagangan, perdagangan dalam dan luar negeri; dan</p> <p>~ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
		<p>ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal (SKA);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Melaksanakan promosi dagang melalui pameran dagang baik lokal, regional maupun nasional terhadap produk unggulan daerah;</li> <li>~ Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perdagangan termasuk barang kebutuhan pokok, barang penting, sarana prasarana perdagangan, perdagangan dalam dan luar negeri;</li> <li>~ Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perdagangan termasuk barang kebutuhan pokok, barang penting, sarana prasarana perdagangan, perdagangan dalam dan luar negeri; dan</li> <li>~ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>	
16.	Kepala Bidang Pasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar, sarana dan prasarana pasar, serta pengendalian dan penertiban pasar;</li> <li>~ Memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar, sarana dan prasarana pasar, serta pengendalian dan penertiban pasar;</li> <li>~ Memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan pasar, sarana dan prasarana pasar, serta pengendalian dan penertiban pasar;</li> <li>~ Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan pasar, sarana dan prasarana pasar, serta pengendalian dan penertiban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar, sarana dan prasarana pasar, serta pengendalian dan penertiban pasar;</li> <li>~ Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar, sarana dan prasarana pasar, serta pengendalian dan penertiban pasar;</li> <li>~ Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pasar,</li> </ul>

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
		<p>pasar;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Melaksanakan pengelolaan pasar, pengembangan sarana dan prasarana pasar serta pengendalian dan penertiban pasar;</li> <li>~ Melaksanakan pelayanan retribusi pasar yang meliputi pendaftaran, pembetulan, pembatalan, penundaan pembayaran/angsuran, keberatan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, kelebihan pembayaran, penghapusan ketetapan dan sengketa retribusi pasar;</li> <li>~ melaksanakan pemungutan retribusi pasar yang meliputi pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan, pembayaran dan penagihan retribusi pasar;</li> <li>~ Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemungutan yang meliputi pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan, pembayaran dan penagihan retribusi pasar dan pelayanan retribusi pasar yang meliputi pendaftaran, pembetulan, pembatalan, penundaan pembayaran/ angsuran, keberatan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, kelebihan pembayaran, penghapusan ketetapan dan sengketa Retribusi Pasar;</li> <li>~ Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pasar, sarana dan prasarana pasar, serta pengendalian dan penertiban pasar; dan</li> <li>~ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>	<p>sarana dan prasarana pasar, serta pengendalian dan penertiban pasar; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
19.	Kepala UPT. Kemetrologian	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Menyusun rencana kerja UPT. Kemetrologian</li> <li>~ Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kemetrologian</li> <li>~ Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kemetrologian</li> <li>~ Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengawasan dalam pengembangan kemetrologian</li> <li>~ Melaksanakan kegiatan operasional kemetrologian</li> <li>~ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT. Kemetrologian</li> <li>~ Melaksanakan Tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Menyusun Rencana Kerja UPT. Kemetrologian</li> <li>~ Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengendalian dan Operasional Kemetrologian</li> <li>~ Penyusunan program dan Kegiatan Pengendalian dan Operasional Kemetrologian</li> <li>~ Penyusunan Bahan pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian dan Operasional Kemetrologian</li> <li>~ Pelaksanaan Pengendalian dan Operasional Kemetrologian</li> <li>~ Pelaksanaan pengawasan dan Evaluasi Kegiatan UPT. Kemetrologian</li> <li>~ Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi</li> </ul>
20.	Kepala UPT. Pasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Menyusun rencana kerja UPT. Pasar</li> <li>~ Melaksanakan pemungutan retribusi pasar</li> <li>~ Melaksanakan ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar</li> <li>~ Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana dilingkungan pasar</li> <li>~ Melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi pengelolaan pasar</li> <li>~ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT. pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Menyusun Rencana Kerja UPT. Pasar</li> <li>~ Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengendalian dan Operasional pasar</li> <li>~ Penyusunan program dan Kegiatan Pengendalian dan Operasional pasar</li> <li>~ Penyusunan Bahan pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi</li> </ul>

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Melaksanakan Tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian dan Operasional pasar</li> <li>~ Pelaksanaan Pengendalian dan Operasional pasar</li> <li>~ Pelaksanaan pengawasan dan Evaluasi Kegiatan UPT. pasar</li> <li>~ Pelaksanaan Fungsi Lain Yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi</li> </ul>
21.	Kepala UPT. Pengembangan Tenun dan Batik	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Menyusun rencana kerja UPT. Pengembangan Tenun dan Batik</li> <li>~ Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan Tenun dan Batik samawa</li> <li>~ Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pengembangan Tenun dan Batik samawa</li> <li>~ Melaksanakan pengembangan Tenun dan Batik samawa</li> <li>~ Melaksanakan Inventarisasi Pengembangan Tenun dan Batik samawa</li> <li>~ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT. Pengembangan Tenun dan Batik</li> <li>~ Melaksanakan Tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Penyusunan Rencana Kerja UPT. Pengembangan Tenun dan Batik samawa</li> <li>~ Penyusunan Program dan Kegiatan pengembangan Tenun dan Batik samawa</li> <li>~ Pelaksanaan pengembangan Tenun dan Batik samawa</li> <li>~ Pelaksanaan Pengawasan dan evaluasi kegiatan UPT. pengembangan Tenun dan Batik</li> <li>~ Pelaksanaan Fungsi Lain Yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi</li> </ul>

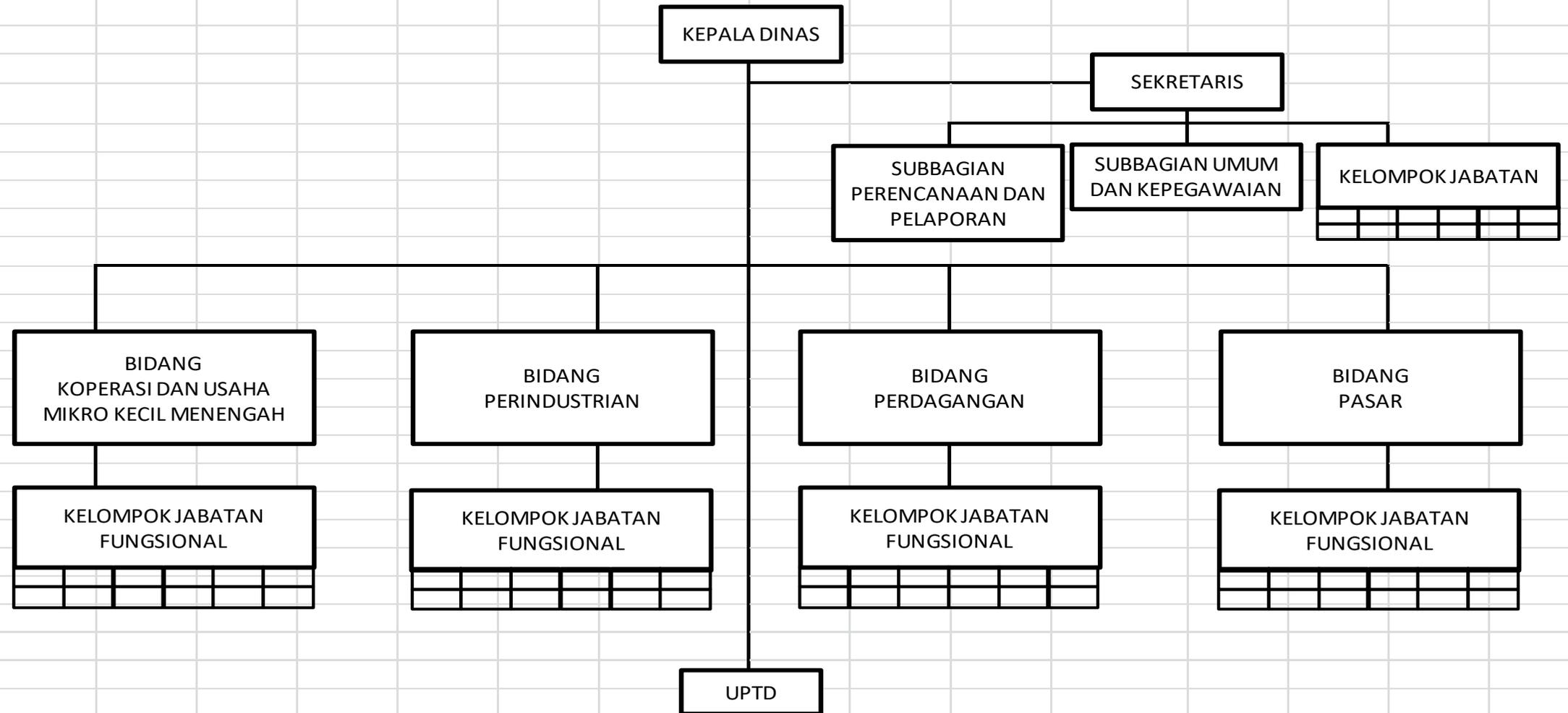
### 2.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 90 Tahun 2020 Tentang

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, adalah :

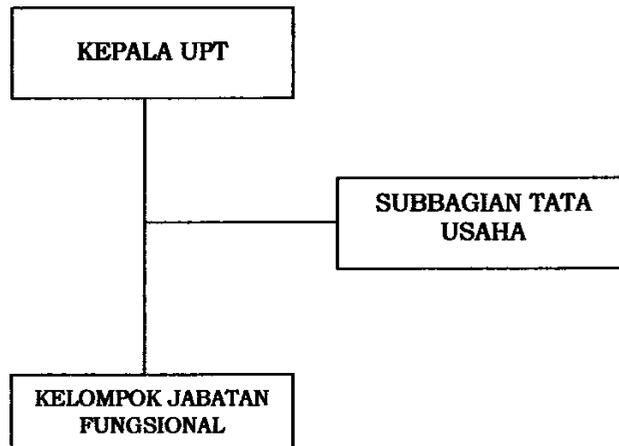
1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas.
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat terdiri atas:
  - Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
  - a. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah terdiri atas:
  - b. Bidang Perindustrian terdiri atas:
  - c. Bidang Perdagangan terdiri atas:
  - d. Bidang Pasar terdiri atas:
  - e. UPT terdiri atas:
    - UPT Kemetrolagian.
    - UPT Pasar
    - UPT Pengembangan Tenun dan Batik
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SUMBAWA**



**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT)  
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUMBAWA**

I. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELAS A



II. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELAS B



## 2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Perangkat Daerah

Keadaan pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa per 31 Desember 2020 disajikan kondisi dan status kepegawaian pada tiap bagian yang merupakan komponen utama pada aspek Sumber Daya Manusia di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa yang akan mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, yaitu:

#### a. Data SDM Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Bidang	Jumlah PNS (Orang)	Jumlah Tenaga Kontrak (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Sekretariat	14	-	14
2	Bidang Koperasi	6	-	6
3	Bidang UMKM	5	-	5
4	Bidang Perindustrian	5	4	9
5	Bidang Perdagangan	5	-	5
6	UPT. Kemetrolagian	2	-	2
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>	<b>4</b>	<b>41</b>

#### b. Data SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan/Bidang	S2	S1/D4	D3-D1	SMA	SMP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris Dinas	-	-	-	-	-	-	
3	Bidang Koperasi	1	4	-	1	-	-	6
4	Bidang UMKM		3	1	1	-	-	5
5	Bidang Perindustrian	1	6	1	1	-	-	9
6	Bidang Perdagangan		4		1	-	-	5
7	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian	-	4	1	3	-	-	8
8	Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan	-	3	-	-	-	-	3
9	Sub. Bagian Keuangan	-	1	1	-	-	-	2
10	UPT. Kemetrolagian	-	2	-	-	-	-	2
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41</b>

### c. Data SDM Berdasarkan Batas Usia Pensiun

No	Bagian	2021	2022	2023	2024	2025	2026	>2026
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-
2	Sekretaris Dinas	-	-	-	-	-	-	-
3	Bidang Koperasi	-	1	-	-	1	-	4
4	Bidang UMKM	1	-	-	-	2	-	2
5	Bidang Perindustrian	-	-	1	-	-	-	4
6	Bidang Perdagangan	1	-	-	-	-	-	4
7	Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	8
8	Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan	-	-	-	-	-	1	2
9	Sub. Bagian Keuangan	-	-	-	-	-	-	2
10	UPT. Kemetrolgian	-	-	-	-	-	-	2
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>28</b>

Selain data SDM berdasarkan status kepegawaian, tingkat Pendidikan dan batas masa kerja, sampai Tahun 2021 ini di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa terdapat beberapa jabatan struktural yang masih kosong dan sementara ini ditunjuk pelaksana tugas (Plt.) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

- a. Kepala Dinas (Ess IIb);
- b. Kepala Bidang Perdagangan (Ess IIIb);
- c. KUPT.Pasar Wilayah I (Ess IVa);
- d. KUPT.Pasar Wilayah II (Ess IVa);
- e. KUPT. Pengembangan Tenun dan Batik (Ess IVa)
- f. KTU. UPT. Kemetrolgian (Ess IVb)
- g. KTU. UPT. Pengembangan Tenun dan Batik (Ess IVb)
- h. KTU. UPT. Pasar Wilayah I (Ess IVb)
- i. KTU. UPT. Pasar Wilayah II (Ess IVb)

#### 2.2.2. Aset Yang Dikelola

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah yang lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa selaku Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan penertiban asset melalui kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam DBP/ DBKP menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pencatatan barang milik daerah yang dikelola atau berada di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa disesuaikan dengan sebaran terhadap pemanfaatan asset/modal tersebut sebagaimana dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Berikut disajikan data asset/modal pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa berdasarkan jenis asset sesuai data KIB Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa sampai dengan Tahun 2020, sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A**  
**TANAH**

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
 Bidang : Bidang Perindustrian  
 Unit Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  
 Sub Unit Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  
 U P B : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO. KODE LOKASI : 17.15.05.12.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter				Hak	Sertifikat					
								Tanggal	Nomor				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000001	440,00	2012	Kel. Lempoh	Hak Pakai	07/08/2015	18/Lempoh/2012	UPT Pasar	Pembelian	1.158.551,00	UPT Pasar Wilayah II
2	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000020	220,00	2015	Desa Ropang Kec. Ropang	Hak Pakai			Pasar	Pembelian	7.000,00	Tanah Untuk Pembangunan Pasar Wilayah Desa Ropang Kec. Ropang
3	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000021	2.926,00	2003	Desa Empang Bawah Kec. Empang	Hak Pakai			Pembangunan Pasar Empang	Pembelian	1.170.000,00	Pasar Desa Empang Bawah Kec. Empang (hasil penilaian kembali tahun 2014)
4	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000022	4.941,41	2003	Desa Empang Bawah Empang	Hak Pakai			Pembangunan Pasar Empang	Pembelian	117.903,00	Sarana Pasar Empang
5	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000023	455,61	2003	Desa Empang Bawah Empang	Hak Pakai			Pembangunan Pasar Empang	Pembelian	10.070,00	Sarana Pasar Empang
6	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000024	4.754,00	2012	Pasar Breng Biji	Hak Pakai				Pembelian	1.102.670,00	Mutasi dari DPPK
7	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000025	3.707,00	2012	Pasar Desa Dalam Atas	Hak Pakai				Pembelian	222.400,00	Mutasi dari DPPK
8	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000026	3.976,00	2012	Pasar Empang Atas	Hak Pakai				Pembelian	148.300,00	Mutasi dari DPPK
9	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000027	100,00	2009	Pasar Empang	Hak Pakai				Pembelian	15.000,00	Tambahan tanah pasar ( Mutasi dari DPPK)
10	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000028	4.574,00	2012	Pasar Kebayar, Jangam Iqok	Hak Pakai				Pembelian	148.220,00	Mutasi dari DPPK
11	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000029	15.000,00	2012	pasar lebangka suka damai	Hak Pakai				Pembelian	150.000,00	Mutasi dari DPPK
12	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000030	2.081,00	2012	Pasar Lab. Sumbawa	Hak Pakai				Pembelian	457.820,00	Mutasi dari DPPK
13	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000031	2.503,00	2012	Pasar Luryuk	Hak Pakai				Pembelian	75.000,00	Mutasi dari DPPK
14	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000032	4.503,00	2012	Pasar loba buring- Buar	Hak Pakai				Pembelian	288.000,00	Mutasi dari DPPK
15	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000033	5.000,00	2012	Pasar plumpang	Hak Pakai				Pembelian	270.000,00	Mutasi dari DPPK
16	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000034	12.828,00	2012	Pasar seketing	Hak Pakai				Pembelian	4.098.500,00	Mutasi dari DPPK
17	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000035	1.608,00	2012	Pasar Ulan	Hak Pakai				Pembelian	95.720,00	Mutasi dari DPPK
18	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000036	10.000,00	2009	Pasar ulan	Hak Pakai				Pembelian	200.000,00	Tanah tambahan pasar ulan (Mutasi dari DPPK)
19	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000037	0,00	2013	Desa mapin kebak, Kec. Alas	Hak Pakai			Rencana bangunan Pasar	Pembelian	579.121,50	Mutasi dari Setra
20	Tanah Bangunan Pasar	01.01.01.02.001	000038	16.500,00	2018	Karang Cina	Hak Pakai			Pasar	Pembelian	1.030.154,60	Pembangunan lahan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A  
TANAH

21	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.01.04.001	000002	2.000,00	1975	Jl. Manggis no. 16 Kelurahan Uma Sime	Hak Paksa			Pembangunan Gedung Kantor Reser Uten Baru	Pembelian	700.000,00	ex Dinas Koperasi dan PKM
22	Tanah Kosong Yang Sudah Dipoorntukan	01.01.02.02.002	000002	1.250,00	2010	Pasar Uten Baru	Hak Paksa				Pembelian	82.537,00	Tanah Urugan Untuk Pasar Uten Baru
<b>Jumlah Harga</b>												12.836.797,10	

MENGETAHUI  
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil  
Menengah Perindustrian dan  
Perdagangan  
Riki Girsadi, S.E., M.Si  
NIP. 19691001 199703 1 010

Sumbawa Besar, 31 Desember 2021

Pengurus Barang

Jufriadi

NIP. 19810727 200601 1 020



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B**  
**PERALATAN DAN MESIN**

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
 Bidang : Bidang Perindustrian  
 Unit Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  
 Sub Unit Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  
 U P B : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO. KODE LOKASI : 12.15.05.12.01.01.01

No.	Kode Barang 1.3.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02.01.01.11.007	mesin proses lainnya (dst)	000002	-		Besi	2007						Pembelian	19.650,00	Ex Dinas Koperasi dan KPM/UK
2	02.01.01.11.007	mesin proses lainnya (dst)	000003	-			2015						Hibah	1.543.850,00	Mesin dan peralatan proses pupuk organik/hibah dari Kementerian Perindustrian
3	02.01.01.11.007	mesin proses lainnya (dst)	000004	-		besi	2019						Pembelian	11.090.725,00	Mesin Produksi/Mesin Retned Kraganeri /SIRIM Leseng F-Rona
4	02.01.01.11.007	mesin proses lainnya (dst)	000005	-		besi	2019						Pembelian	145.970,00	Peralatan Mesin Produksi Mie Rumpit Lauty SIRIM Leseng
5	02.01.01.11.007	mesin proses lainnya (dst)	000006	-		besi	2019						Pembelian	152.003,50	Peralatan/Mesin produksi dodol rumpit laut/SIRIM Leseng
6	02.01.01.11.007	mesin proses lainnya (dst)	000007	-		besi	2019						Pembelian	143.985,30	Peralatan/Mesin produksi kerupuk rumpit laut/SIRIM Leseng
7	02.01.03.05.002	Portable Water Pump	000005	-			2014						Pembelian	150.872,00	Gudang SRG Labangka
8	02.01.03.05.002	Portable Water Pump	000006	Shimizu Lektor 900 watt Shimizu		Besi	2017						Pembelian	7.200,00	Mesin Air SRG Labangka
9	02.01.03.05.002	Portable Water Pump	000007 s/d 000009	Shimizu		Besi	2011						Pembelian	7.500,00	Untuk Pesar Seketeng
10	02.01.03.05.002	Portable Water Pump	000010	Shimizu		Besi	2012						Pembelian	2.500,00	
11	02.01.03.05.003	Stationary Water Pump	000011 s/d 000012	Jet Pump Shimizu ps-135		besi	2021						Pembelian	10.000,00	Pasar Utan



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B**  
**PERALATAN DAN MESIN**

17	02.01.03.05.010	Pompa Air	000003	SANYO P-HISAC Simbu	Besi	2018							Pembelian	1.412,40	Kantor
13	02.01.03.05.010	Pompa Air	000003		Besi	2015							Pembelian	1.800,00	Pasar Atas
14	02.01.03.05.010	Pompa Air	000004	Yamakoya / GWP 93 Inlet	Besi	2019							Pembelian	3.900,00	Nosih Pompa Air Paser Kerito
15	02.01.03.05.010	Pompa Air	000005	Shimizu / RC200 Air	Besi	2019							Pembelian	3.900,00	Nosih Pompa Air Paser Brang Ban
16	02.01.03.05.010	Pompa Air	000006	Shimizu / RC-130 (G)	Besi	2019							Pembelian	3.900,00	Nosih Pompa Air Paser Brang Ban
17	02.02.01.01.003	Stasiun Wagon	000001	TOYOTA / (90H) KIDANG STANDAR, CF 7U SHORT	1750	2000	MHFK70V0091379	7K 0370637	EA 1213 AA	A.9974130.0			Pembelian	50.000,00	Operasional Bidang
18	02.02.01.01.003	Stasiun Wagon	000002	DATATEL / F700GG TX MT	1095 CC	2015	MHKS20201K109442	3520H05596	EA 82 AA				Pembelian	301.575,00	Bagian APP dan LPSP, Setda + Honor
19	02.02.01.02.003	Minibus (Perumpang 14 Orang Kenworth)	000002	Isuzu D-Max	2500	2018	MHATF66LUT006824	SK1512	EA 8105 AA				Pembelian	802.687,50	Unit Classic type double cabin (4x4) -Unit Karoseri khusus mobil metrolog (Perangasan) Operasional Gudang SRG Lepak
20	02.02.01.03.004	Truck - Mekanikal	000001	HINOY D19JAL042R-HKHTD3 H/T Suzuki / RC 100	3500	2019	W0EC1G49K5191821	W0HDTRH73663	EA 8112 AA				Pembelian	355.300,00	(Ex Dinas Kabupaten dan PKK)
21	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000003 s/d 000004	Honda / Supre X	100	2008							Pembelian	5.000,00	Gruping dan Asst
22	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000005 s/d 000006	Honda / Supre X	125	2008							Pembelian	13.927,20	Mutasi dan DPPK
23	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000007	Honda / Supre X NF 125 TD	125	2015							Pembelian	28.120,00	trial (mutasi dan setda)
24	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	000008	Kawasaki / Kix 150	150	2015	MHKLX1E3R0070657	LXLBX06R1943	EA 4150 AA				Pembelian	172.625,00	
25	02.02.01.05.001	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	000001 s/d 000005	VMAR Kenya 200 L-2017 / 200 L-2017	3004	2018							Pembelian	52.165,00	
26	02.02.01.05.001	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	000006	VMAR Kenya 200 HMDT / 200 HMDT	Besi	2018							Pembelian	10.000,00	
27	02.02.02.01.007	Serobek Besi	000016 s/d 000025	5.3	gang plat	2021							Pembelian	5.000,00	Perumukan untuk pasar
28	02.03.02.05.019	Jangka Besi	000001	Mitsuba / Digital	Besi	2012							Pembelian	2.500,00	
29	02.03.02.05.019	Jangka Besi	000002	Mitsuba / Manual	Besi	2012							Pembelian	75.782,52	Sejana ukur standar kelas III Kapasitas 1000 liter/LITR Kemetrologian
30	02.03.03.09.010	Bejana Ukur	000001	-		2019							Pembelian		



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B**  
**PERALATAN DAN MESIN**

31	02.03.03.09.010	Bejana Ukur	000002	-			2018				Pembelian	57.111,77	Bejana ukur standar kelas II 500 liter/UPT Kemetrologian
32	02.03.03.09.010	Bejana Ukur	000003	-			2018				Pembelian	34.462,58	Bejana ukur standar kelas III 100 liter/UPT Kemetrologian
33	02.03.03.09.010	Bejana Ukur	000004	-			2018				Pembelian	22.589,08	Bejana ukur standar kelas III 50 liter/UPT Kemetrologian
34	02.03.03.09.010	Bejana Ukur	000005	-			2018				Pembelian	16.205,93	Bejana ukur standar kelas III 20 liter/UPT Kemetrologian
35	02.03.03.05.011	Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya)	000001	-		Besi	2011				Pembelian	10.000,00	Timbangan
36	02.03.03.05.011	Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya)	000002	-			2018				Pembelian	25.200,00	Pengadaan alat ukur kadar air UPT Kemetrologian
37	02.03.03.05.011	Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya)	000003	-			2018				Pembelian	14.805,50	Alat ukur kadar air Lainnya/UPT Kemetrologian
38	02.03.03.09.011	Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya)	000004	Ampas		Plastik	2020				Pembelian	6.000,00	Pengadaan Timbangan
39	02.03.03.09.018	alat ukur tanah lainnya (cost)	000001	-		Besi	2012				Pembelian	685.125,27	
40	02.03.03.10.002	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	000001	CB	500 Kg	Besi	2011				Pembelian	6.000,00	
41	02.03.03.10.002	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	000002	Toleco Meter		Besi	2011				Pembelian	51.800,00	Timbangan Pas ukur Litang/Distomet
42	02.03.03.10.002	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	000004	FRT		lain-l	2019				Pembelian	5.159,00	Timbangan Digital 300 kg/5kg Lopak
43	02.03.03.10.003	Timbangan Meja Kapasitas 5 kg	000001	-		Besi	2009				Pembelian	500,00	
44	02.03.03.10.037	alat timbangan/balok lainnya (cost)	000001 s/d 000002	-			2011				Pembelian	1.250,00	Digitalometer dan Tomometer
45	02.03.03.11.015	Anak Timbangan Beker	000001 s/d 000075	-		Besi	2017				Pembelian	75.000,00	UTTP Kemetrologian
46	02.03.03.11.015	Anak Timbangan Beker	000076 s/d 000075	-		Besi	2018				Pembelian	199.760,00	anak timbangan beker kelas M 2 20 kg
47	02.03.03.11.015	Anak Timbangan Dari Besi	000002	-		Besi	2018				Pembelian	2.716,09	Anak timbangan besi kelas M2 ( 20 kg)UPT Kemetrologian
48	02.04.01.01.005	Serpu Pecul	000011 s/d 000020	-		Besi	2011				Pembelian	755,02	
49	02.04.01.01.007	Serpu Besi	000031 s/d 000050	-		Besi	2012				Pembelian	1.548,00	



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B**  
**PERALATAN DAN MESIN**

50	02.04.01.03.006	Alat Pengukur Kelembaban (Moisture Tester)	000001	DRAMENSKI			2019							Pembelian	31.976,00	Meter Kadar Air dan Jagung/SRG Lopak
51	02.04.01.04.005	Lemari Penyimpan	000001	-	Kayu		2007							Pembelian	2.500,00	Ex Dinas Perindag
52	02.04.01.05.015	Alat Laboratorium lainnya	000001 s/d 000011	-			2018							Pembelian	31.141,18	Landsan Cap Tera/UPT Kemetrologian
53	02.04.01.05.015	Alat Laboratorium lainnya	000002 s/d 000005	-			2018							Pembelian	19.804,33	Meja Sidang Tera/UPT Kemetrologian
54	02.04.01.05.015	Alat Laboratorium lainnya	000006 s/d 000009	-			2018							Pembelian	5.757,09	Tang Sig/UPT Kemetrologian
55	02.04.01.05.015	Alat Laboratorium lainnya	000010	-			2018							Pembelian	20.631,71	Toolset Untuk Seling Tera/UPT Kemetrologian
56	02.04.01.05.015	Alat Laboratorium lainnya	000012	-			2018							Pembelian	2.358,00	Terminator digital 50 7 0,5 UPT Kemetrologian
57	02.04.01.05.015	Alat Laboratorium lainnya	000013	-			2018							Pembelian	21.600,41	Meja Tahsan Gesar/UPT Kemetrologian
58	02.04.01.05.015	Alat Laboratorium lainnya	000014	-			2018							Pembelian	22.466,76	Dekumeter/UPT Kemetrologian
59	02.04.01.10.001	Alat Pengolahan lainnya	000001	-	besi		2019							Pembelian	1817.015,00	Mesin Penggiling Rod (RMUM SRG Lopak Laka boalong
60	02.04.01.10.001	Alat Pengolahan lainnya	000002	-	besi		2020							Pembelian	1.805.267,37	
61	02.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	000001 s/d 000005	-	Besi		2009							Pembelian	2.500,00	
62	02.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	000006 s/d 000008	Brother	Besi		2012							Pembelian	5.826,33	
63	02.05.01.01.001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	000009 s/d 000010	-	besi		2004							Pembelian	5.000,00	mesin ketik
64	02.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	000007	-	besi		1993							Pembelian	7.104,00	mesin ketik
65	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	000001 s/d 000003	Brother	Besi		2012							Pembelian	11.250,00	
66	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	000004 s/d 000007	-	Besi		2012							Pembelian	8.712,00	
67	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	000008 s/d 000008	ACENSI	Metal		2021							Pembelian	6.300,00	skrinorlat
68	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	000006 s/d 000008	-	Kayu		2008							Pembelian	13.500,00	Ex Dinas Perindag
69	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	000009 s/d 000010	-	Kayu		2020							Pembelian	14.960,00	R. Kade (Unipog
70	02.05.01.04.004	Rak Kayu	000006	-	Kayu		2002							Pembelian	184,00	( Ex Dinas Koperasi dan PKM)
71	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000002 s/d 000008	-	Rakit		2007							Pembelian	6.750,00	Ex Dinas Perindag



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B**  
**PERALATAN DAN MESIN**

72	01.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000009 s/d 000012	VIP		Besi	2009					Pembelian	2.700,00	Ex Dinas Koperasi dan PKM
73	07.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000013 s/d 000017 000020	-		Besi	2009					Pembelian	3.120,00	Ex Dinas Pendidng
74	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi		-		Besi	2009					Pembelian	590,00	Ex Dinas Koperasi dan PKM
75	03.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000021	Nasional		Besi	2012					Pembelian	3.500,00	
76	07.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000022	VIP		Mesal	2014					Pembelian	3.450,75	Gudang SRG Labangla
77	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000023	VIP		Mesal	2014					Pembelian	3.450,75	Gudang SRG Labangla
78	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	000024 s/d 000025 000033	Tigor		besi	2017					Pembelian	5.798,30	UPT Bank.
79	02.05.01.04.007	Brankas	000033	-		Besi	1987					Pembelian	1.488,00	Ex Dinas Koperasi dan PKM
80	02.05.01.04.007	Brankas	000034	Nasional		Besi	2000					Pembelian	1.850,00	Ex Dinas Koperasi dan PKM
81	02.05.01.04.007	Brankas	000037	Nasional	150 kg	Besi	2011					Pembelian	3.685,00	Untuk Dana Sekelompok
82	02.05.01.04.027	Lantai Kaca	000001 s/d 000004 000001 s/d 000006 000007	-	60 x 125 cm	Kayu	2010					Pembelian	1.500,00	
83	02.05.01.05.003	Papan Miskal/Papan Nama	000001 s/d 000006 000007	-		Kayu	2011					Pembelian	3.738,76	Papan Struktur Organisasi Diklat/Intra Kantor
84	02.05.01.05.003	Papan Miskal/Papan Nama	000005	-		11 plank	2013					Pembelian	5.255,40	
85	02.05.01.05.003	Papan Miskal/Papan Nama	000009	-		Kayu/12 plank	2019					Pembelian	1.930,50	Papan Nama Untuk Dekorasida Meja Sdkh. Jln
87	07.05.01.05.043	Merlin Absensi	000007	Revo D-212 90		plastik	2017					Pembelian	4.500,00	Sekretariat
88	07.05.01.05.043	LCD Projector/Infocus	000001	Cherlux		PLA571K	2021					Pembelian	4.040,00	
89	02.05.01.05.043	LCD Projector/Infocus	000007	Vensonic		plastik	2021					Pembelian	6.050,00	sd. Industri
90	02.05.01.05.053	Focusing Screen/Layar LCD Projector	000001	GTC		Besi + plastik	2011					Pembelian	14.790,00	
91	02.05.01.05.053	Focusing Screen/Layar LCD Projector	000002	Samsung		Besi	2012					Pembelian	6.000,00	
92	02.05.01.05.075	Papan Nama Instansi	000001 s/d 000007 000015	-		Kayu	2009					Pembelian	17.915,00	
93	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	000015	-		besi	2014					Pembelian	7.500,00	Showroom
94	02.05.01.05.077	Papan Pengumuman	000015	Besi		Besi	2015					Pembelian	20.000,00	Papan pengumuman dan KIB C
95	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	000007 s/d 000026	-		Besi	2011	Lebar 1,5 m Tebal 10 Cm				Pembelian	20.500,00	
96	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	000027	-		Besi	2012					Pembelian	3.000,00	



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B**  
**PERALATAN DAN MESIN**

97	02.05.01.05.088	Alat Kantor lainnya	000020	-	-	kayu	2013					Pembelian	2.450,00	Ruang Rapat
98	02.05.01.05.088	Alat Kantor lainnya	000030	-	-	Besi	2013					Pembelian	30.921,62	Tarif Jangka Showroom
99	02.05.01.05.088	Alat Kantor lainnya	000031	-	-	kayu	2015					Pembelian	1.000,00	Papan petunjuk/gudang SRG Labangia
100	02.05.01.05.088	Alat Kantor lainnya	000032	-	-	campuran	2015					Pembelian	1.000,00	Alat Kebersihan/gudang Siga Labangia ruang Rapat
101	02.05.02.01.005	Meja Rapat	000001	-	-	kayu	2014					Pembelian	2.625,00	R. Rapat
102	02.05.02.01.013	Meja Podium	000001	-	-	kayu	2015					Pembelian	2.500,00	R. Rapat
103	02.05.02.01.016	Meja Tambahan	000001 s/d 000050	-	-	1/2 besi + Triplek + Rod kayu	2017					Pembelian	50.000,00	Meja Lipat
104	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000001	-	-	kayu	2019					Pembelian	2.907,50	Meja biro besar untuk Desmanesda
105	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	000016	-	-	kayu	2013					Pembelian	1.655,00	Meja Biro Gedung Ex Dinas Perindag
106	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000001	-	-	kayu	2007					Pembelian	4.500,00	Ex Dinas Perindag
107	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000005 s/d 000007	-	-	kayu	2004					Pembelian	4.188,00	Ex Dinas Perindag
108	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000008	-	-	kayu	2008					Pembelian	7.527,50	Ex Dinas Perindag
109	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000009	-	-	Busa	2014					Pembelian	5.991,20	Gudang SRG Labangia Ruang Kabis
110	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	000010 s/d 000011	-	-	kayu - Busa besi	2018					Pembelian	12.500,00	Ex Dinas Perindag Gudang SRG Labangia
111	02.05.02.01.036	Kursi Upet	000101 s/d 000120	-	-	Chitose	2006					Pembelian	3.328,00	Ex Dinas Perindag Gudang SRG Labangia
112	02.05.02.01.036	Kursi Upet	000121 s/d 000170	-	-	Dieter	2014					Pembelian	3.329,00	Rumah Produk/Berung (semer)
113	02.05.02.01.030	Meubelur lainnya	000001 s/d 000000	-	-	Besi	2016					Pembelian	145.000,00	Alat mesin Gedung (semer) Kantor
114	02.05.02.01.050	Meubelur lainnya	000021 s/d 000040	-	-	kayu	2016					Pembelian	54.000,00	Ex Dinas Perindag Gudang SRG Labangia
115	02.05.02.03.007	Alat Pembersih lainnya	000001	-	-	-	2013					Pembelian	5.250,00	Ex Dinas Perindag Gudang SRG Labangia
116	02.05.02.04.001	Lemari Es	000001	-	-	plastik	2007					Pembelian	3.500,00	Mobile Box Cooler
117	02.05.02.04.001	Lemari Es	000002	-	-	Sanyo	2012					Pembelian	2.000,00	Rooming Gudang Lantai II
118	02.05.02.04.002	A.C. Window	000001 s/d 000002	-	-	Panasonic	2013					Pembelian	19.279,40	AC Duduk / Ruang Rapat
119	02.05.02.04.002	A.C. Window	000003	-	-	Polytron PSF 3003 Sanyo	2017					Pembelian	16.000,00	Ex Dinas Koperasi dan PKM
120	02.05.02.04.004	A.C. Split	000002	-	-	Besi	1998					Pembelian	2.352,00	
121	02.05.02.04.004	A.C. Split	000005 s/d 000007	-	-	Besi	2009					Pembelian	24.263,70	



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B**  
**PERALATAN DAN MESIN**

122	02.05.02.04.004	A.C. Split	000009	LG / 1 PK	Besi	2011					Pembelian	4.554,00	
123	02.05.02.04.004	A.C. Split	000010 s/d 000011	Panasonic / 1 PK	Besi	2012					Pembelian	9.145,40	
124	02.05.02.04.004	A.C. Split	000012 s/d 000013 000014	Panasonic / 3/4 PK Panasonic	Besi	2012					Pembelian	8.485,40	
125	02.05.02.04.004	A.C. Split	000015	LG	Kastik	2014					Pembelian	9.100,00	Ruang rapat
126	02.05.02.04.004	A.C. Split	000015	LG	Fiber	2015					Pembelian	4.454,00	R. Sekretariat
127	02.05.02.04.004	A.C. Split	000016 s/d 000017	Polytron	Fiber	2017					Pembelian	10.339,10	UPT Batik
128	02.05.02.04.004	A.C. Split	000018	sharf	Fiber	2018					Pembelian	4.543,40	Ruang Kede
129	02.05.02.04.004	A.C. Split	000019 s/d 000021 000022	Uchida Sharf	Vibr	2018					Pembelian	32.000,00	UPT Kementerian Bk. Pensi
130	02.05.02.04.004	A.C. Split	000023 s/d 000024	-	Fiber	2021					Pembelian	4.545,40	
131	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000025 s/d 000026	-	Kastik	2020					Pembelian	1.192,40	
132	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000027	Maspion	Kastik	2012					Pembelian	600,00	
133	02.05.02.04.006	Kipas Angin	000028 s/d 000029	Sekai	Kastik	2013					Pembelian	2.100,00	Showroom
134	02.05.02.06.002	Televisi	000030	Samsung	Kastik	2012					Pembelian	4.990,20	
135	02.05.02.06.008	Sound System	000031	Polytron	Besi-Kayu	2010					Pembelian	3.434,70	
136	02.05.02.06.012	Wireless	000032	Morley C4-150		2015					Pembelian	2.500,00	Microfon Wireless Box/R. Rapat Tala usaha
137	02.05.02.06.014	Microphone	000033	SHURE BETA 58 A	komputa r	2018					Pembelian	1.303,10	
138	02.05.02.06.021	Camera Video	000034	Camera Sony DSC H 300	Kastik	2017					Pembelian	8.000,00	Camera Handycam/kante r
139	02.05.02.06.022	Camera film	000035	-		2012					Pembelian	7.784,90	
140	02.05.02.06.022	Camera film	000036	Camera Sony HDR P1 410 Broo	plastik	2017					Pembelian	6.300,00	Camera Digital/kantor UPT Batik
141	02.05.02.06.024	Mesin Jahit	000037 s/d 000038	-	Besi	2017					Pembelian	17.500,00	UPT Batik /Mesin Jahit Tala usaha
142	02.05.02.06.026	Tangga Aluminium	000039	-	Aluminium	2016					Pembelian	1.127,00	Tangga Upret
143	02.05.02.06.046	Handy Cam	000040	-		2012					Pembelian	9.673,50	
144	02.05.02.06.053	GendyinyKroy	000041 s/d 000042	Vertikal	Vinil	2012					Pembelian	29.587,00	
145	02.05.02.06.055	GendyinyKroy	000043 s/d 000044	-	Kain	2012					Pembelian	5.400,00	
146	02.05.02.06.058	GendyinyKroy	000045	-	kain	2013					Pembelian	42.000,00	Showroom
147	02.05.02.06.059	GendyinyKroy	000046	-	Kain	2017					Pembelian	6.040,00	UPT Batik
148	02.05.02.06.059	GendyinyKroy	000047	-	Vinil	2019					Pembelian	31.185,00	Garden gedung kantor dinas
149	02.05.02.06.059	GendyinyKroy	000048	-	Vinil	2019					Pembelian	11.320,00	Garden kantor Dekranasda Patec
150	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	000049 s/d 000050	-	Kayu	2011					Pembelian	17.500,00	
151	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	000051 s/d 000052	-	Kayu	2011					Pembelian	4.000,00	Tangga Stapel



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B**  
**PERALATAN DAN MESIN**

152	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	001255 s/d 001274	-		2016				Pembelian	80.000,00	Alat cetak Berkas/UPT Batik
153	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	001275	-		2016				Pembelian	9.000,00	Mesin Pancing Kancing/UPT Batik
154	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	001276	-		2016				Pembelian	30.000,00	Alat Heni/UPT Batik
155	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	001277 s/d 001281	-		2016				Pembelian	2.000,00	Manekin Full Body/UPT batik
156	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	001282 s/d 001286	-		2016				Pembelian	2.400,00	Manekin 1/2 Body/UPT batik
157	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	001287 s/d 001295	-		2016				Pembelian	1.200,00	Alat Penchabung Berkas/UPT Batik
158	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	001297 s/d 001305	-		2016				Pembelian	2.400,00	headisplay/UPT Batik
159	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	001307 s/d 001311	-		2016				Pembelian	45.000,00	Rumah Produkut (Gautho )/UPT Batik
160	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	001312 s/d 001315	-		2016				Pembelian	15.000,00	Alat Tenun Tradisional/UPT Batik
161	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	001317 s/d 001321	-	Kayu	2016				Pembelian	15.000,00	Alat cetak Berkas/UPT Batik
162	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	001322 s/d 001375	-	Kayu	2016				Pembelian	10.800,00	Tenda Bambu/UPT Batik
163	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	001376	-		2016				Pembelian	112.800,00	Mesin Bordir/UPT Batik
164	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	001377	-	Kayu	2017				Pembelian	3.450,00	Papan Rumpu Teks
165	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	001378 s/d 001383	Okta	Kayu	2017				Pembelian	15.000,00	UPT Batik, Mesin Pelang Kain
166	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	001384	-	Aluminium, kaca	2017				Pembelian	4.500,00	UPT Batik, Lubase
167	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	001385 s/d 001387	-	Aluminium, kayu	2017				Pembelian	13.500,00	UPT Batik, etalase
168	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	003001 s/d 003003	1/2 Biro	Kayu	2007				Pembelian	2.415,00	Di Dinas Perindag
169	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	003004	1/2 Biro	Kayu	2007				Pembelian	605,00	Di Dinas Koperasi dan PKM
170	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	003005 s/d 003008	1/2 Biro	Kayu	1997				Pembelian	595,20	Di Dinas Koperasi dan PKM
171	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	003010 s/d 003015	1/2 Biro	Kayu	1995				Pembelian	1.125,00	Di Dinas Koperasi dan PKM
172	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000016 s/d 000024	1/2 Biro	Kayu	1997				Pembelian	2.054,00	Di Dinas Koperasi dan PKM



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B**  
**PERALATAN DAN MESIN**

173	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000025 s/d 000054	1/2 Biro	Kayu	1990						Pembelian	5.160,00	Ex Dinas Koperasi dan PKM
174	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000055 s/d 000057	Biro	Kayu	2003						Pembelian	1.942,00	Ex Dinas Koperasi dan PKM
175	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000058 s/d 000060	1/2 Biro	Kayu	2003						Pembelian	1.926,00	Ex Dinas Koperasi dan PKM
176	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000061 s/d 000063	1/2 Biro	Kayu	2004						Pembelian	2.376,00	Ex Dinas Perindag
177	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000065	Biro	Kayu	2004						Pembelian	653,00	Ex Dinas Koperasi dan PKM
178	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000066 s/d 000067	1/2 Biro	Kayu	2006						Pembelian	13.395,00	Ex Dinas Perindag
179	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000068 s/d 000069	-	Kayu	2012						Pembelian	5.000,00	
180	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000090	Biro	Kayu	2012						Pembelian	2.008,40	
181	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000091 s/d 000093	olimpik		2014						Pembelian	4.274,70	Gudang SRC Labangia
182	02.05.03.01.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000094 s/d 000096	kayu	kayu	2012						Pembelian	7.800,00	UPF Sabik
183	02.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	000001	-	Plastik	2007						Pembelian	1.056,00	Ex Dinas Koperasi dan PKM
184	02.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	000002	-	Beal	2003						Pembelian	702,00	Ex Dinas Koperasi dan PKM
185	02.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	000003	-	Beal	2012						Pembelian	1.270,40	
186	02.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	000004	Tiger	Busa	2012						Pembelian	3.900,00	R. Kepala Dinas
187	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000002 s/d 000003	-	Plastik	2007						Pembelian	1.800,00	Ex Dinas Perindag
188	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000006 s/d 000011	Isabel	Besi	2005						Pembelian	2.147,00	Ex Dinas Perindag
189	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000012 s/d 000014	Mawin		2014						Pembelian	6.645,00	Kantor
190	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000015 s/d 000024	Tiger	Busa	2012						Pembelian	19.600,00	Bidang
191	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000025	-	Busa	2013						Pembelian	2.200,00	Kursi eselon III untuk Dekranasda
192	02.05.03.03.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000026	-		2012						Pembelian	7.098,64	
193	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000001	-	Besi	2004						Pembelian	768,00	Ex Dinas Koperasi dan PKM
194	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000002 s/d 000007	Ushinto	Besi + Plastik	2011						Pembelian	6.375,60	
195	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000008 s/d 000010	-	Plastik	2007						Pembelian	2.570,00	Ex Dinas Perindag
196	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000013 s/d 000014	-	Plastik	2013						Pembelian	3.090,00	Kursi Kerja Eselon IV



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B**  
**PERALATAN DAN MESIN**

197	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000015 s/d 000017	melan			2014				Pembelian	5.535,00	Kantor
198	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000018 s/d 000020	-			2014				Pembelian	5.535,00	gedung GRG Labangka
199	02.05.03.03.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	000021 s/d 000024	-		Busa	2019				Pembelian	7.370,00	Kursi eselon IV/Kantor
200	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000001	-		Kayu	2009				Pembelian	1.214,40	
201	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000001	-		Plastik	2013				Pembelian	1.230,00	Kantor
202	02.05.03.03.009	Kursi Kerja Pejabat lainnya	000001 s/d 000003	Activ		Busa	2017				Pembelian	5.535,00	UPT Bank, Kursi Kerja Ex Dinas Koperasi dan PKM
203	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000001 s/d 000003	-		Kayu	2007				Pembelian	4.300,00	Rusekretariat
204	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000010	Kayu		Kayu	2015				Pembelian	2.000,00	Bid. Pragnan
205	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000011	Kayu		Kayu	2015				Pembelian	2.500,00	Bid. Pragnan
206	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000012	Kayu		Kayu	2016				Pembelian	3.400,00	S. Kadis
207	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000013 s/d 000014	-		Kayu	2017				Pembelian	5.000,00	Kantor/Bid Keuangan
208	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000015 s/d 000016	-			2018				Pembelian	4.990,00	Lemari Arsip/Kantor
209	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000017	-			2017				Pembelian	5.000,00	
210	02.06.01.02.051	Lensa Kamera	000001	-		Plastik	2012				Pembelian	5.000,00	
211	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	000001	Mitsubishi		Plastik	2011				Pembelian	1.851,00	
212	02.06.01.02.105	Layar Film/Projector	000004	Sony		Plastik	2017				Pembelian	9.000,00	LCD
213	02.06.02.01.003	Pesawat Telephone	000007	Panasonic KX- FTS81		plastik	2017				Pembelian	1.100,00	Fax Kantor
214	02.06.02.01.008	Handy Talky (HT)	000001	Weierwei		Plastik	2012				Pembelian	5.000,00	
215	02.06.03.17.002	Genet	000001	Genet		Resi	2017				Pembelian	15.740,38	UPT Bank
216	02.08.01.01.009	Timbangan Elektronik	000001	-			2016				Pembelian	98.419,76	Timbangan Elektronik kapasitas > 30 kg untuk M1, M2, M3 db 0,1 g/UPT Kametrologien
217	02.08.01.01.009	Timbangan Elektronik	000002	-			2016				Pembelian	47.332,63	Timbangan elektronik kapasitas > 0 kg untuk M1, M2, M3 db 0,01 g/ UPT Metrologi



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B**  
**PERALATAN DAN MESIN**

219	02.08.01.01.005	Timbangan Elektronik	00003	-			2016				Pembelian	39.740,61	Timbangan Elektronik kapasitas >200 kg untuk M1,M2,M3 db 0,01 mg/ LPT
219	02.08.01.10.066	Thermohygrimeter (AAT Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	00001	-			2016				Pembelian	5.050,80	Kemungkinan Thermohygrimeter/LPT
220	02.08.01.41.004	Alat Despresing Jeruk Kap 100 Kg	00002 s/d 00005	First Alert	Plastik		2011				Pembelian	6.000,00	Kemungkinan Alarm asap
221	02.08.01.41.004	Alat Despresing Jeruk Kap 100 Kg	00006 s/d 00010	First Alert			2015				Pembelian	7.975,00	Alat Pemadam Kebakaran volume 6 kg/SRG Lepak Anak
222	02.08.01.56.115	Anak Timbangan	00001	-			2016				Pembelian	8.883,19	Timbangan Kelas M1 (1 mg 1kg)/LPT
223	02.08.01.56.115	Anak Timbangan	00002	-			2016				Pembelian	1.702,80	Timbangan Kelas M1 (1 mg 1kg)/LPT
224	02.08.01.56.115	Anak Timbangan	00003	-			2016				Pembelian	2.134,04	Timbangan Kelas M1 (1 kg)/LPT
225	02.08.01.56.115	Anak Timbangan	00004	-			2016				Pembelian	5.877,43	Timbangan Kelas M1 (5 kg)/LPT
226	02.08.01.56.115	Anak Timbangan	00005	-			2016				Pembelian	6.007,75	Timbangan Kelas M1 (10 kg)/LPT
227	02.08.01.56.115	Anak Timbangan	00006	-			2016				Pembelian	10.556,12	Timbangan Kelas M1 (20 kg)/LPT
228	02.08.01.56.115	Anak Timbangan	00007	-			2016				Pembelian	4.596,55	Timbangan Miligram Kelas M1 (1 ml-500 mg)/LPT



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B**  
**PERALATAN DAN MESIN**

229	02.08.01.56.115	Anak Timbangan	000008	-		2018					Pembelian	11.506,60	Anak Timbangan Kelas M2 (1 ml - 1 kg) 25 buah/UPT Kemetrologian
230	02.08.01.56.115	Anak Timbangan	000009	-		2018					Pembelian	2.162,29	Anak Timbangan Kelas M2 (1 kg)/UPT Kemetrologian
231	02.08.01.56.115	Anak Timbangan	000010	-		2018					Pembelian	2.904,00	Anak Timbangan Kelas M1 (7 kg)/UPT Kemetrologian
232	02.08.01.56.115	Anak Timbangan	000011	-		2018					Pembelian	6.241,79	Anak Timbangan Kelas M1 (5 kg)/UPT Kemetrologian
233	02.08.01.56.115	Anak Timbangan	000012 s/d 000013	-		2018					Pembelian	11.122,25	Anak Timbangan Kelas M1 (10 kg)/UPT Kemetrologian
234	02.08.01.56.115	Anak Timbangan	000014 s/d 000015	-		2018					Pembelian	19.374,46	Anak Timbangan Kelas M1 (20 kg)/UPT Kemetrologian
235	02.08.01.56.115	Anak Timbangan	000016 s/d 000019	-	Besi	2018					Pembelian	4.412,84	Anak timbangan Besi kelas M2 (5 kg)/UPT Kemetrologian
236	02.08.01.56.115	Anak Timbangan	000020 s/d 000023	-	Besi	2018					Pembelian	7.203,63	Anak timbangan besi kelas M2 (10 kg)/UPT Kemetrologian
237	02.08.01.56.115	Anak Timbangan	000024 s/d 000025	-	Besi	2018					Pembelian	5.432,18	Anak timbangan Besi kelas M2 (20 kg)/UPT Kemetrologian
238	02.08.01.56.115	Anak Timbangan	000026	-	Besi	2017					Pembelian	19.850,05	(Ex Dinas Koperal dan POM)/UDK Kemetrologian
239	02.08.01.56.115	Anak Timbangan	000027	-	Besi	2018					Pembelian	2.716,09	Anak timbangan Besi kelas M2 (20 kg)/UPT Kemetrologian
240	02.08.01.56.115	Anak Timbangan	000028 s/d 000029	-	Besi	2018					Pembelian	9.891,78	Anak timbangan untuk rumah dinas logam/UPT Kemetrologian



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B**  
**PERALATAN DAN MESIN**

241	02.08.01.55.115	Anak Timbangan	000030	-		Besi	2010					Pembelian	455,85	Anak timbangan besi kelas M2 ( 1 kg)UPT Kemetrologian
242	02.08.01.55.115	Anak Timbangan	000031	-		Besi	2018					Pembelian	679,85	Anak timbangan besi kelas M2 ( 2 kg)UPT Kemetrologian
243	02.08.01.55.115	Anak Timbangan	000038 s/d 000040	-		Besi	2018					Pembelian	1.367,58	Anak Timbangan besi kelas M2 ( 1 kg)UPT Kemetrologian
244	02.08.01.55.115	Anak Timbangan	000041 s/d 000043	-		Besi	2018					Pembelian	2.030,81	Anak timbangan besi kelas M2 ( 2 kg)UPT Kemetrologian
245	02.08.03.01.012	Geas Ukur	000001	-			2018					Pembelian	2.922,12	Geas Ukur Kapasitas 1 liter daya tarik 100 m/UPT Kemetrologian
246	02.08.05.01.001	Barometer (Meteorological Equipment)	000001	-			2018					Pembelian	5.295,43	UPT Kemetrologian
247	02.08.05.01.030	meteorological equipment lainnya (dst)	000001	-			2018					Pembelian	9.959,83	Sumbu Ukur ( Salib Ukur)UPT Kemetrologian
248	02.08.05.01.030	meteorological equipment lainnya (dst)	000002	-			2018					Pembelian	4.804,83	Tongkat Jala 2x2 m/UPT Kemetrologian
249	02.08.05.01.030	meteorological equipment lainnya (dst)	000003	-			2018					Pembelian	3.185,31	Stapwan Daya Baca 0,01 s/UPT Kemetrologian
250	02.10.01.02.001	P.C Unit	000012 s/d 000013	-		Flestatik	2009					Pembelian	19.714,29	
251	02.10.01.02.001	P.C Unit	000014 s/d 000017	-	P4 Intel Core i3	Flestatik + Besi	2011					Pembelian	24.992,00	
252	02.10.01.02.001	P.C Unit	000018 s/d 000019	-	P4 Intel Core i3	Flestatik + Besi	2011					Pembelian	20.000,00	
253	02.10.01.02.001	P.C Unit	000020	-	P4 Intel Core i3	Flestatik + Besi	2011					Pembelian	17.500,00	
254	02.10.01.02.001	P.C Unit	000021 s/d 000023	-	P4	Flestatik + Besi	2012					Pembelian	30.000,00	
255	02.10.01.02.001	P.C Unit	000024	-	Acer	Flestatik	2014					Pembelian	8.000,00	Kantor
256	02.10.01.02.001	P.C Unit	000027	-	acer	Flestatik	2014					Pembelian	8.000,00	Kantor
257	02.10.01.02.001	P.C Unit	000028	-	Acer	Flestatik	2014					Pembelian	8.500,00	Gudang 500 lbangka
258	02.10.01.02.001	P.C Unit	000030	-	Acer	Flestatik	2016					Pembelian	7.000,00	Bd.Kop
259	02.10.01.02.001	P.C Unit	000031	-	Acer	Flestatik	2016					Pembelian	15.000,00	UPT Batik
260	02.10.01.02.001	P.C Unit	000032 s/d 000039	-	LG	plastik	2017					Pembelian	20.500,00	Kantor
261	02.10.01.02.001	P.C Unit	000040 s/d 000045	-	Lg	Flestatik	2022					Pembelian	31.366,20	Umpeg,UKM,Perdagangan,UPT Metrolog



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B**  
**PERALATAN DAN MESIN**

252	02.10.01.02.001	A.C Unit	000044	LENOVO		Pastik	2021					Pembelian	16.300,00	Bid. Pesta
253	02.10.01.02.002	Lap Top	00004	lenovo		Pastik	2009					Pembelian	17.454,60	
261	02.10.01.02.002	Lap Top	000005	Toshiba		Pastik	2014					Pembelian	10.000,00	Kantor
265	02.10.01.02.002	Lap Top	000006	toshiba		plastik	2014					Pembelian	9.000,00	Gudang SRG Labangka
266	02.10.01.02.002	Lap Top	000007	Toshiba		Fiber	2015					Pembelian	12.274,50	Bid. Program
267	02.10.01.02.002	Lap Top	000009	HP		Pastik	2015					Pembelian	10.050,00	R. Sekretariat
268	02.10.01.02.002	Lap Top	000009	toshiba		plastik	2015					Pembelian	9.000,00	Bid. Program
269	02.10.01.02.002	Lap Top	000010 s/d 000011	hp		fiber	2017					Pembelian	21.000,00	Bid. Koperasi + s/wa Dinas
270	02.10.01.02.002	Lap Top	000012	Asus			2019					Pembelian	15.361,50	Lap top /Kantor (Benc. Pengl.0 Lp)
271	02.10.01.02.002	Lap Top	000013 s/d 000014	Asus			2019					Pembelian	21.142,00	Top/Kasubag Program/Kadk Umsep
272	02.10.01.02.002	Lap Top	000015	Acer		plastik	2020					Pembelian	11.000,00	
273	02.10.01.02.002	Lap Top	000016	Apple		Fiber	2021					Pembelian	24.997,50	bid. Industri
274	02.10.01.02.002	Lap Top	000017	ASUS NOTEBOOK M412FL		CAMPURAN	2020					Pembelian	15.600,00	BADAN PENGUPATAN DASISAH
275	02.10.01.02.002	Lap Top	000018	Gigabyte s/d 15		campuran	2020					Pembelian	16.900,00	Bependa Kabupaten sumbawa
276	02.10.01.02.003	Note Book	000006 s/d 000007	Dell		Pastik	2021					Pembelian	29.876,00	Sub Pengarang/Pesa r Sekotang
277	02.10.02.01.012	Hard Disk	000001	Seagate	500 Gb	Pastik	2012					Pembelian	1.730,00	
278	02.10.02.01.012	Hard Disk	000002	Toshiba			2014					Pembelian	1.301,60	kantor
279	02.10.02.01.012	Hard Disk	000003	aca			2014					Pembelian	1.500,00	Gudang SRG Labangka
280	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000016 s/d 000017	Canon / MP 287		Pastik	2011					Pembelian	2.500,00	
281	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000019 s/d 000021	Canon		Pastik	2012					Pembelian	3.750,00	
282	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000022 s/d 000023	Canon Pisma		Pastik	2014					Pembelian	2.500,00	Kantor
283	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000025	Canon Pisma		plastik	2014					Pembelian	1.500,00	gudang SRG Labangka
284	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000027	Pisma Canon		Pastik	2015					Pembelian	1.957,32	R. Sekretariat
285	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000028	HP Laserjet M 125A			2015					Pembelian	2.100,00	Bid. Program
286	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000029	Canon Pisma			2015					Pembelian	1.950,00	R. Sekretariat
287	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000030	Pisma Canon		Pastik	2015					Pembelian	1.650,00	Bid. Penganggru/ Gudang SRG Labangka
288	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000031 s/d 000032	Canon Pisma		plastik	2016					Pembelian	3.900,00	Bid. Industri/Kop



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B**  
**PERALATAN DAN MESIN**

289	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000033	HP / Pro Cp 1029	Fiber	2016					Pembelian	5.500,00	pt. Lippo Jet/ UPT Baku
290	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000034	Epson / Injet L 300	Fiber	2016					Pembelian	2.700,00	Pt. Injet /UPT Baku
291	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000035 s/d 000042	Canon Plasma	plastik	2017					Pembelian	15.640,00	Batik Kantor
292	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000043	Epson		2019					Pembelian	3.630,00	Printer / Beng. Peng. Kantor
293	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000044 s/d 000045	Canon		2019					Pembelian	3.911,00	Printer Industri & UKM
294	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000046 s/d 000050	Canon Plasma	Rastik	2020					Pembelian	9.751,50	Unipag, URM, Perdagangan, UPT, Ketrilog
295	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000051	EPSON L1110	plastik	2021					Pembelian	2.500,00	Hasar sekoteng
296	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000052	EPSON L4150	Fiber	2021					Pembelian	5.971,00	Sub. Program
297	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000053	EPSON L5190	fiber	2021					Pembelian	5.999,40	Ed. Industri
298	02.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	000002	scandnap st 3001	plastik	2020					Pembelian	0.460,00	Ed. Program
299	02.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	000003	Rustek smartoffice P52B3 Toshiba	plastik	2021					Pembelian	5.969,40	Ed. Industri
300	02.10.02.03.018	Peralatan Personal Komputer lainnya	000001	-	Plastik	2014					Pembelian	1.266,00	[Betray Laptop]/Kantor
301	02.15.03.02.005	Tenda	000001 s/d 000012	-	Stanis	2019					Pembelian	197.907,00	Tenda karung standar event/ Kantor Wukis portable/Kantor
302	02.15.03.02.005	Tenda	000013	Asaron	Rastik	2019					Pembelian	4.498,00	
<b>Jumlah Harga</b>											22.661.071,94		

**MENGETAHUI**  
**Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil**  
**Menengah Perindustrian dan**  
**Perdagangan**  
 Riki trisnawati, S.Pd, M.Si  
 NIP. 19691004 199703 1 010

Sumbawa Besar, 31 Desember 2021

Pengurus Barang

*[Signature]*  
 Tufriadi

NIP. 19810727 200801 1 020



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C  
GEDUNG DAN BANGUNAN

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
 Bidang : Bidang Perindustrian  
 Unit Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  
 Sub Unit Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  
 U P B : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  
 NO. KODE LOKASI : 12.15.06.12.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (D,KB,RP)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang I.S.	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000002	Baik	Tidak	Beton	254	Jl. Manggis				Tanah Milik Pemda		Pembelian	659.626,98	Ex. Dinas Inperind dan UKM
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000010	Baik	Tidak	Beton	20	Jl. Manggis				Tanah Milik Pemda		Pembelian	96.963,49	Ruang Anop
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000029	Baik	Tidak	Beton		Pasar Nias				Tanah Milik Pemda		Pembelian	587.597,60	Renovasi Bangunan Renc pemukiman dan kantor pengelola pasar
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000030	Baik	Tidak	Beton		Jl. Garuda						Pembelian	604.290,30	Bangunan Gedung UPT Lantik
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000031	Baik	Bertingkat	Beton		Jl. Manggis No. 16				Tanah Milik Pemda		Pembelian	938.441,00	Perencanaan + Pengawasan Kantor KUKM Indag + Honorarium Tim Pelaksana dan Promotor
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000032	Baik	Tidak	Beton		Jl. Manggis No 16						Pembelian	216.307,59	Kantor Dinas KUKM-Indag/R. Keuangan
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000033	Baik	Tidak	Beton		Jalan Garuda						Pembelian	204.156,57	Ruang penunjang pelayanan UPT
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000034	Baik	Tidak	Beton		Jalan Manggis No. 16 Sumbawa Besar						Pembelian	210.946,08	Lehun dan Batik Gedung Kantor KUKM-Indag + Perencanaan dan Pengawasan/R. Sekretaris
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000035	Baik	Tidak	Beton	74	Jln Manggis No. 16 Sumbawa Besar						Pembelian	208.285,86	Kantor KUKM Indag/R. Kabis Ruang Kerja
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	03.01.01.01.001	000036	Baik	Tidak	Beton	68	Jalan Manggis No 16 (Dinas KUKM-Indag)						Pembelian	201.154,14	
11	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	03.01.01.01.005	000021	Baik	Bertingkat	Beton	1					Tanah Milik Pemda		Pembelian	1.297.779,80	





**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C**  
**GEDUNG DAN BANGUNAN**

20	Bangunan Gedung Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000015	Baik	Tidak	Beton		Kec. Labangia					Pembelian	426.061,00	Bangunan kantor pengelola dan rumah jaga SRG Labangia
29	Bangunan Gedung Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000019	Baik	Tidak	Tidak		Kec. Labangia					Pembelian	5.000,00	Sertifikasi Gedung SRG Labangia
30	Bangunan Gedung Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000020	Baik	Tidak	Beton		Kec. Lopok/ERG Baga-rango					Pembelian	11.118,00	Pengadaan dan pemasangan jet Pum SRG Baga-rango
31	Bangunan Gedung Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000021	Baik	Tidak	Beton		Leseng					Pembelian	1.446.485,90	Gedung bahan baku SKUM + Kandang + Perawatan
32	Bangunan Gedung Lain-lain (dst)	03.01.01.02.014	000025	Baik	Tidak	Beton	289,5	Leseng					Pembelian	199.943,24	Instal Gedung Produkul dan Tempur Kiji Simulus Penanganan Covid-19
33	Bangunan Tempur Swafah Lain-lain (dst)	03.01.01.08.004	000002	Baik	Tidak	Beton		Mushollah Brang Biji	31/12/2015				Pembelian	90.106,00	Mushollah Brang Biji Mutasi dari DPRK
34	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000046	Baik	Tidak	Beton	2					Tanah Milik Pemda	Pembelian	135.096,00	Lapak PKL Rhee
35	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000050	Baik	Tidak	Beton	235	Desa Usar Mach Alas Berau					Hibah	699.016,63	Pasar Tradisional Hibah Kementerian Koperasi/BNH
36	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000060	Baik	Tidak	Beton	352	Desa Labuhan Burung Kec. Suer					Hibah	673.620,00	Pasar Tradisional Hibah Kementerian Koperasi/BNH
37	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000061	Baik	Tidak	Beton	240	Desa Leseng				Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.394.296,50	Pasar Empang
38	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000062	Baik	Tidak	Beton						Tanah Milik Pemda	Pembelian	621.378,38	
39	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000063	Baik	Tidak	Beton						Tanah Milik Pemda	Pembelian	661.552,00	
40	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000064	Baik	Tidak	Beton		Desa Langam				Tanah Milik Pemda	Pembelian	125.000,00	Pasar Langam
41	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000065	Baik	Tidak	Tidak	1					Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.500,00	Pasar Labuhan
42	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000066	Baik	Tidak	Beton	1					Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.993.160,99	Pasar Alas



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C  
GEDUNG DAN BANGUNAN

43	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000067	Baik	Tidak	Beton	37					Tanah Milik Penda		Pembelian	1.158.751,80	Pasar Unang Pj
44	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000068	Baik	Tidak	Beton	1					Tanah Milik Penda		Pembelian	15.000,00	Pasar Langem
45	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000069	Baik	Tidak	Beton	1					Tanah Milik Penda		Pembelian	52.206,00	Pasar Langem
46	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000070	Baik	Tidak	Beton	105					Tanah Milik Penda		Pembelian	305.216,40	
47	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000071	Baik	Tidak	Beton	1					Tanah Milik Penda		Pembelian	240.000,00	
48	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000072	Baik	Tidak	Beton				Pasar Unang		Tanah Milik Penda		Pembelian	262.077,00	Renovasi bangunan los dan kios pasar
49	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000073	Baik	Tidak	Beton				Pasar Labuhan Sumbawa		Tanah Milik Penda		Pembelian	1.290.600,00	Renovasi Pasar Labuhan Sumbawa + Honor Peroleh Barang ( 15.250.000 ) + Perencanaan + Pengawasan Peribangunan Los Pasar Lab. Sumbawa + perencanaan + Pengawasan
50	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000074	Baik	Tidak	Beton				Pasar Labuhan Sumbawa				Pembelian	203.150,00	Peroleh + perencanaan + Pengawasan Peribangunan Los Pasar Lab. Sumbawa + perencanaan + Pengawasan
51	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000075	Baik	Tidak	Beton				Pasar Labuhan Sumbawa				Pembelian	152.550,00	Peroleh + perencanaan + Pengawasan Peribangunan Los Pasar Lab. Sumbawa + perencanaan + Pengawasan
52	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000076	Baik	Tidak	Beton				Pasar Empang				Pembelian	203.835,00	Renovasi bangunan Peroleh + perencanaan + Pengawasan Peribangunan Los Pasar Empang + Perencanaan + Pengawasan
53	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000077	Baik	Tidak	Beton				Pasar Empang				Pembelian	213.835,00	Peroleh + perencanaan + Pengawasan Peribangunan Los Pasar Empang + Perencanaan + Pengawasan
54	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000078	Baik	Tidak	Beton				Pasar Seketeng				Pembelian	105.356,00	Rehab. los diaging Pasar sekoteng + Perencanaan + Pengawasan
55	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000079	Baik	Tidak	Beton				Pasar Seketeng				Pembelian	112.130,00	Rehab. Los Jauh Pasar Seketeng + Perencanaan + Pengawasan



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C  
GEDUNG DAN BANGUNAN

55	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000060	Baik				Langgam	31/12/2017				Pembelian	3.039.285,64	Renovasi Pasar Langgam 4
57	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000061	Baik				Desa Langgam					Pembelian	149.800,00	Honorarium Pemakaian ruang lapak pasar Langgam
58	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000062	Baik				Desa Langgam					Pembelian	203.150,00	Pembangunan kios pasar Langgam
59	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000063	Baik	Tidak			Labuhan Sumbawa					Pembelian	274.639,00	Pembangunan Lok Pasar Labuhan Sumbawa
60	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000064	Baik	Tidak			Utari					Pembelian	5.629.478,20	Pembangunan Pasar Utari
61	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000065	Baik	Bertriplat	Beton	2431,05	Pasar Sekelatang	20/06/2019	027/12/PPK/BAP Bk/04/2019		Tanah Milik Pemda	Pembelian	65.981.377,50	Pembangunan Pasar sekelatang blok B dan lok C nomor PPK, PPH, PPII Blok A Pasar Sekelatang
62	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000066	Baik		Beton	6059,6	Pasar Sekelatang					Pembelian	25.713.353,00	
63	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000067	Baik	Tidak	Beton	335,3	Pasar Utari	10/05/2020	-			Pembelian	199.531,95	Furing Blok Pasar Utari (Kerangka, Konstruksi, Pengawasan)
64	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000068	Baik	Tidak	Tidak		Pasar Labuhan Sumbawa	14/05/2020				Pembelian	5.852,30	Perbaikan atap/ Talang Sarungin pasar Labuhan Sumbawa
65	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	03.01.01.12.001	000069	Baik	Tidak	Tidak		Pasar	14/05/2020				Pembelian	3.872,00	
66	Bangunan Gedung Pertokoan lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000042	Baik	Tidak	Beton	110					Tanah Milik Manda	Pembelian	43.100,00	SRG Bago Tongo
67	Bangunan Gedung Pertokoan lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000171	Baik	Tidak	Beton		Kel. Uma Sima					Pembelian	194.650,00	Lapak PKL Kel. Uma Sima e perencanaan 1 Pengawasan
68	Bangunan Gedung Pertokoan lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000175	Baik	Tidak	Beton		Krato					Pembelian	199.459,04	Lapak PKL Taman Krato
69	Bangunan Gedung Pertokoan lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000176	Baik	Tidak	Beton		Alas					Pembelian	294.250,00	Lapak PKL dan MCK Di Alas
70	Bangunan Gedung Pertokoan lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000177	Baik	Tidak	Beton		Kel. Bugis					Pembelian	260.500,00	Lapak PKL di taman bugis
71	Bangunan Gedung Pertokoan lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000170	Baik	Tidak	Beton		Kec. Moyo Utara					Pembelian	181.860,00	lapak PKL Sebang Kec. Moyo Utara 9 Unit
72	Bangunan Gedung Pertokoan lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000179	Baik	Tidak	Beton		Kec. Terano Labu Janibu					Pembelian	198.715,34	Lapak PKL Labu Janu Kec. Terano 8 Unit



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B**  
**PERALATAN DAN MESIN**

218	02.06.01.01.009	Timbangan Elektronik	000003	-			2018					Pembelian	39.740,51	Timbangan Elektronik kapasitas >200 kg untuk ML,M2,M3 di 0,01 mg/UPT Kemetrologian
219	02.06.01.10.055	Thermohyrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	000001	-			2018					Pembelian	5.896,80	Thermohyrometer =/UPT Kemetrologian
220	02.06.01.41.004	Alat Degreasing Jeruk Kap 100 Kg	000002 s/d 000005	First Alert		Plastik	2011					Pembelian	6.000,00	Alam aspa
221	02.06.01.41.004	Alat Degreasing Jeruk Kap 100 Kg	000006 s/d 000010	Fix Fix			2018					Pembelian	7.575,00	Alat Pemasam Kibakoran volume 6 kg/ERG Lepak Anak
222	02.06.01.56.115	Anak Timbangan	000001	-			2018					Pembelian	8.683,49	Timbangan Kelas M1 (1 mg-1kg)/UPT Kemetrologian Anak
223	02.06.01.56.115	Anak Timbangan	000002	-			2018					Pembelian	1.702,80	Timbangan Kelas M1 (1 kg)/ UPT Kemetrologian Anak
224	02.06.01.56.115	Anak Timbangan	000003	-			2018					Pembelian	2.434,05	Timbangan Kelas M1 (2 kg)/ UPT Kemetrologian Anak
225	02.06.01.56.115	Anak Timbangan	000004	-			2018					Pembelian	5.672,43	Timbangan Kelas M1 (5 kg)/ UPT Kemetrologian Anak
226	02.06.01.56.115	Anak Timbangan	000005	-			2018					Pembelian	8.062,75	Timbangan Kelas M1 (10 kg)/UPT Kemetrologian Anak
227	02.06.01.56.115	Anak Timbangan	000006	-			2018					Pembelian	15.559,17	Timbangan Kelas M1 (20 kg)/UPT Kemetrologian Anak
228	02.06.01.56.115	Anak Timbangan	000007	-			2018					Pembelian	4.508,55	Timbangan Miligram Kelas M1 (0 ml-500 ml)/UPT Kemetrologian



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C**  
**GEDUNG DAN BANGUNAN**

73	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000180	Bek	Tidak	Beton	60	manente kec. eles				Pembelian	96.136,94	Lapak PKO Manene kec. alas 5 Unit
74	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000181	Bek	Tidak	Beton	414	kec. Utan				Pembelian	96.360,43	pelataran pasar Utan
75	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000182	Bek	Tidak	Tidak		Casa Empang		Tanah Milik Pemda		Pembelian	479.236,00	Pasar Empang
76	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000183	Bek	Tidak	Beton		Casa Empang		Tanah Milik Pemda		Pembelian	109.141,00	Pasar Empang
77	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000184	Bek	Tidak	Beton		Kel. Sekotong				Pembelian	33.900,00	Pasar Sekotong
78	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000185	Bek	Tidak	Beton		Casa Matang kec. Utan		Tanah Milik Pemda		Pembelian	35.697,00	Pasar Utan
79	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000186	Bek	Tidak	Beton		Kel. Brang Biji		Tanah Milik Pemda		Pembelian	101.505,00	Pasar Brang Biji
80	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000187	Bek	Tidak	Tidak		Kel. Brang Biji		Tanah Milik Pemda		Pembelian	1.053.960,00	Pasar Brang Biji
81	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000188	Bek	Tidak	Tidak		Casa Utan		Tanah Milik Pemda		Pembelian	785.185,00	Pasar Utan
82	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000189	Bek	Tidak	Beton				Tanah Milik Pemda		Pembelian	75.000,00	Pasar Alas
83	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000190	Bek	Tidak	Beton	225			Tanah Milik Pemda		Pembelian	143.046,00	Brang Bara
84	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000191	Bek	Tidak	Beton	150			Tanah Milik Pemda		Pembelian	1.209.999,00	
85	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000192	Bek	Tidak	Beton	1			Tanah Milik Pemda		Pembelian	65.066,90	
86	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000193	Bek	Tidak	Beton				Tanah Milik Pemda		Pembelian	104.000,50	
87	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000194	Bek	Tidak	Beton				Tanah Milik Pemda		Pembelian	15.000,00	Pasar Lab. Sumbawa
88	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000195	Bek	Tidak	Beton				Tanah Milik Pemda		Pembelian	3.449.383,03	Pasar Pampang
89	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000196	Bek	Tidak	Beton				Tanah Milik Pemda		Pembelian	6.170,00	Pasar Pampang
90	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000197	Bek	Tidak	Beton				Tanah Milik Pemda		Pembelian	104.300,00	Pasar Labuhan Sumbawa
91	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000198	Bek	Tidak	Beton				Tanah Milik Pemda		Pembelian	191.700,00	Pasar Labuhan Sumbawa
92	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000199	Bek	Tidak	Beton				Tanah Milik Pemda		Pembelian	4.500,00	Pasar Pampang
93	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000200	Bek	Tidak	Beton				Tanah Milik Pemda		Pembelian	152.600,00	Pasar Pampang
94	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000201	Bek	Tidak	Beton				Tanah Milik Pemda		Pembelian	11.293,59	Pasar Labuhan Sumbawa
95	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000202	Bek	Tidak	Beton				Tanah Milik Pemda		Pembelian	20.000,00	MOK Pasar Labuhan Sumbawa
96	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000203	Bek	Tidak	Beton		Empang		Tanah Milik Pemda		Pembelian	140.800,00	Pengaspalan Halaman Parkir dan Jalan
97	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000204	Bek	Tidak	Beton		Pasar pampang		Tanah Milik Pemda		Pembelian	86.514,60	Pengadaan Lapak



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C**  
**GEDUNG DAN BANGUNAN**

98	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000205	Bek	Tidak	Beton	Pasar Plemang				Tanah MUK Pemda	Pembelian	4.553,40	Jaminan Pemeliharaan Lepak
99	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000206	Bek	Tidak	Beton	Pasar Plemang				Tanah MUK Pemda	Pembelian	30.625,00	Pengadaanapak 4 Unit
100	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000207	Bek	Tidak	Beton	pasar Plemang				Tanah MUK Pemda	Pembelian	112.808,70	renovasi pagar dan pintu gerbang
101	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000208	Bek	Tidak	Beton	Pasar Plemang				Tanah MUK Pemda	Pembelian	5.537,30	Jaminan pemeliharaan pagar dan pintu gerbang
102	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000209	Bek	Tidak	Beton	Jaman Bayu				Tanah MUK Pemda	Pembelian	336.780,00	Bangunan Lepak paving blok kantor pengkode dan MUK
103	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000210	Bek	Tidak	Beton	Pasar Alas				Tanah MUK Pemda	Pembelian	657.113,00	Renovasi bangunan ds pagar dan drainage Pasar Honorum Pengadaan dan Perbaikan barang
104	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000211	Bek	Tidak	Beton	Pasar Alas				Tanah MUK Pemda	Pembelian	204.850,50	Bangunan ds pagar ds
105	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000212	Bek	Tidak	Beton	Pasar Alas				Tanah MUK Pemda	Pembelian	85.890,00	Pembangunan lekas samping pasar
106	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000213	Bek	Tidak	Beton	Pasar Alas				Tanah MUK Pemda	Pembelian	20.391,60	Pembangunan telag dan lekas belakang pasar
107	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000214	Bek	Tidak	Beton	Pasar Alas				Tanah MUK Pemda	Pembelian	152.900,50	Pembangunan gerbang dan pagar ds
108	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000215	Bek	Tidak	Beton	Pasal Labuhan Sumbawa				Tanah MUK Pemda	Pembelian	30.000,00	Pemasangan paving blok dan Pemasangan PDAM Pasar
109	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000216	Bek	Tidak	Beton	Desa Dalam kec. Alas	31/02/2015				Pembelian	152.522,00	laku pasar, ds dalam kec. Alas
110	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000217	Bek	Tidak	Tidak	Brang Bara Kab. Sumbawa	31/12/1993				Pembelian	7.000,00	Perbaikan Halaman Pasar Brang Bara/Notasi dari DPPK
111	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000218	Bek	Tidak	Beton	Maya Hill- kec. Noya Hill	31/12/2015				Pembelian	300.340,00	Pengadaan konstruksi ds pasar mayahill/Notasi dari DPPK



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C  
GEDUNG DAN BANGUNAN

112	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000219	Baik	Tidak	Beton	Pasar Labangka	31/12/2015					Pembelian	151.500,00	Rehab sedang kios permanen pasar labangka/Mutasi dari DPPK
113	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000220	Kurang Baik	Tidak	Beton	Pasar Empang Kec. Biring	31/12/2015					Pembelian	20.894,00	Rehab sedang MKK Pasar Empang/Mutasi dari DPPK
114	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000221	Baik	Tidak	Beton	Pasar Labuhan Sumbawa	31/12/2015					Pembelian	42.860,00	Kantor kepala pasar Labuhan Sumbawa/Mutasi dari DPPK
115	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000222	Kurang Baik	Tidak	Beton	Pasar Empang						Pembelian	30.600,00	Rehab sedang los pasar/Mutasi dari DPPK
116	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000223	Baik	Tidak	Beton	Pasar Brang Biji						Pembelian	31.500,00	Rehab sedang los pasar/Mutasi dari DPPK
117	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000224	Baik	Tidak	Beton	Pasar Alas						Pembelian	451.000,00	Rehab los pasar/Mutasi dari DPPK
118	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000225	Baik	Tidak	Beton	Pasar pampang lab. Lunung Buar						Pembelian	233.675,00	Bangunan los Pasar/Mutasi dari DPPK
119	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000226	Baik	Tidak	Beton	Pasar pampang lab. buar						Pembelian	54.596,00	koko pasar/Mutasi dari DPPK
120	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000227	Baik	Tidak	Beton	Pasar Kembang						Pembelian	977.108,00	Bangunan kios Mutasi dari DPPK
121	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000228	Baik	Tidak	Beton	Pasar Brang bano						Pembelian	507.978,00	Bangunan kios Mutasi dari DPPK
122	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000229	Baik	Tidak	Beton	pasar pampang						Pembelian	421.733,00	Bangunan kios Mutasi dari DPPK
123	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000230	Baik	Tidak	Beton	Pasar Utan						Pembelian	250.092,00	Bangunan kios Mutasi dari DPPK
124	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000231	Baik	Tidak	Beton	Pasar lab. Sumbawa						Pembelian	61.584,00	Bangunan kios Mutasi dari DPPK
125	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000232	Baik	Tidak	Beton	Pasar Labangka						Pembelian	343.709,00	Bangunan kios semi permanen/Mutasi dari DPPK
126	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000233	Baik	Tidak	Beton	Pasar seketing						Pembelian	966.756,00	Bangunan kios pasar/Mutasi dari DPPK
127	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000234	Baik	Tidak	Beton	Pasar Brang Biji						Pembelian	676.071,00	Bangunan kios pasar/Mutasi dari DPPK



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C**  
**GEDUNG DAN BANGUNAN**

128	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000235	Baik	Tidak	Beton	Roser Jombang				Pembelian	114.838,00	Bangunan kios pasar/Mutasi dari DPK
129	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000236	Baik	Tidak	Beton	Roser Jombang				Pembelian	77.680,00	toko pasar/Mutasi dari DPK
130	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000237	Baik	Tidak	Beton	Roser Jombang				Pembelian	30.229,00	Kantor pasar/Mutasi dari DPK
141	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000238	Baik	Tidak	Beton	Roser Jombang				Pembelian	15.939,00	Kantor pasar/Mutasi dari DPK
137	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000239	Baik	Tidak	Beton	Roser Jombang				Pembelian	50.194,00	Kantor Pasar/Mutasi dari DPK
135	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000240	Baik	Tidak	Beton	Roser Jombang				Pembelian	19.797,00	Kantor pasar/Mutasi dari DPK
134	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000241	Baik	Bertingkat	Beton	Roser Jombang				Pembelian	7.128,00	Pagar keliling/Mutasi dari DPK
135	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000242	Baik	Tidak	Beton	Roser Jombang				Pembelian	77.842,00	Kantor pasar/Mutasi dari DPK
136	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000243	Baik	Tidak	Beton	Roser Atas				Pembelian	142.485,00	Rahap besi pagar keliling
137	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000244	Baik	Tidak	Beton	Roser Jombang				Pembelian	24.570,00	Konstruksi pagar keliling/Mutasi dari DPK
138	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000245	Baik	Tidak	Tidak	Roser Labuhan Sumbawa				Pembelian	72.946,00	Peny. Ruang kios pasar lab. Sumbawa + Perencanaan + Pengawasan
139	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000246	Baik	Tidak	Beton	Roser Utan				Pembelian	41.400,74	Renovasi empes samping Pasar Utan + Perencanaan + Pengawasan
140	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000247	Baik	Tidak	Beton	Roser Atas				Pembelian	213.725,00	Rahap besi Empes bench dan rabel pagar besi + perencanaan + Pengawasan
141	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000248	Baik	Tidak	Beton	Empes R3 Kab. Sumbawa		31/12/2015		Pembelian	7.800,00	Perkerasan halaman pasar Empes R3/Mutasi dari DPK
142	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	03.01.01.12.004	000249	Baik	Tidak	Beton	MCK Pasar Utan		31/12/2015		Pembelian	19.287,00	Pengadaan Konstruksi MCK Pasar Utan/Mutasi dari DPK



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C  
GEDUNG DAN BANGUNAN

143	Bangunan Gedung Pantheon Lain-lain (dst)	03.01.01.13.004	000000	Bak	Tidak	Beton		Pasar Labuhan Gumbawa	31/12/2015			Pembelian	39.287,00	Pengadaan Konstruksi WC di Pasar Labuhan Sumbawa/Murusah oleh DPRK Pas Jaga 2 Unit
144	Gedung Rus. Jaga Perumahan	03.01.01.13.001	000002	Bak	Tidak	Beton		Pasar Sukuning			Tanah Mlik Pemda	Pembelian	61.386,00	
145	Gedung Pos Jaga Semi Perumahan	03.01.01.13.002	000001	Bak	Tidak	Tidak					Tanah Mlik Pemda	Pembelian	17.026,72	Rumah jaga semi, burning walet
146	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	03.01.01.13.010	000001	Bak	Tidak	Tidak					Tanah Mlik Pemda	Pembelian	22.500,00	Rumah jaga Lang Barena gedung 02 SRG Lopok
147	Gedung Garasi/Pool Perumahan	03.01.01.14.001	000001	Bak	Tidak	Beton		Boge Tongo/lopok				Pembelian	44.926,53	
148	Bangunan Lantai Jemur Perumahan	03.01.01.25.001	000001	Bak	Tidak	Beton	290	GRG Baga-langa				Pembelian	300.802,64	Perluasan lantai jemur SRG Baganaga
149	Bangunan Lantai Jemur Perumahan	03.01.01.25.001	000002	Bak	Tidak	Beton		Kec. Labangka				Pembelian	458.000,00	Pembangunan lantai jemur SRG Labangka
150	Rakasa	03.01.01.25.004	000001	Bak	Tidak	Tidak		Boge Tongo/lopok				Pembelian	8.963,20	Solusi Alap Gedung Pengering Skis Lopok
151	Bangunan Pasar Lain-lain (dst)	03.01.01.28.027	000001	Bak	Tidak	Tidak	282,2	Kel. Sekeleng				Pembelian	306.000,00	Kanopi Pasar Sekeleng
152	Bangunan Tempat Raga Lain-lain (dst)	03.01.01.30.005	000001	Bak	Tidak	Beton					Tanah Mlik Pemda	Pembelian	70.000,00	Lapak PKL Bundungan Jek. Bure
153	Bangunan Tempat Raga Lain-lain (dst)	03.01.01.30.005	000002	Bak	Tidak	Beton	300	Laka Rukung				Pembelian	1.675.550,75	Gedung produksi garam, SIKUM Laka Bontang - kuarim pengadaa Gerbang Sakti Torun Tradisional
154	Bangunan Tempat Raga Lain-lain (dst)	03.01.01.30.005	000003	Bak	Tidak	Beton		Kec. Maya Hura				Pembelian	25.917,00	
155	Bangunan Parkir Terbuka Perumahan	03.01.01.33.001	000003	Bak	Tidak	Beton		Pasar Pampang			Tanah Mlik Pemda	Pembelian	148.705,00	Remasanan Raving Blok dan Kabel Halaman Jaminan
156	Bangunan Parkir Terbuka Perumahan	03.01.01.33.001	000004	Bak	Tidak	Beton		Pasar Pampang			Tanah Mlik Pemda	Pembelian	7.695,00	Pembinaan Raving Blok dan Kabel Halaman Jaminan
157	Bangunan Parkir Terbuka Perumahan	03.01.01.33.001	000005	Bak	Tidak	Beton		Desa Langan				Pembelian	171.200,00	Pembinaan Pekerjaan paving Blok pasar Langan
158	Bangunan Parkir Terbuka Perumahan	03.01.01.33.001	000006	Bak	Tidak	Beton		Empang				Pembelian	50.300,00	Pembangunan Raving Blok Pasar Empang
159	Bangunan Gedung Pabrik Perumahan	03.01.01.34.001	000001	Bak	Tidak	Beton		Boge Tongo/lopok				Pembelian	1.050.250,00	Gedung Pabrik RUMU SRG Lopok e Pengawasan



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C**  
**GEDUNG DAN BANGUNAN**

160	Pagar Perumahan	03.04.01.04.001	000001	Baik	Tidak	Beton	Ujung					Pembelian	652.800,00	Pagar keliling SKRM/Ujung
161	Pagar Perumahan	03.04.01.04.001	000002	Baik	Tidak	Beton	Baga Terigo/Lopok					Pembelian	150.721,64	Pagar Keliling SRC/Aupok
162	Pagar Perumahan	03.04.01.04.001	000003	Baik			Disek Lantjar					Pembelian	150.500,00	Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pagar desa di 8 (delapan) Nama Desa Lantjar Pagar Desa Pagar Utan
163	Pagar Perumahan	03.04.01.04.001	000004	Baik			Utan					Pembelian	146.495,26	Pagar Desa Pagar Utan
164	Pagar Perumahan	03.04.01.04.001	000005	Baik			Utan					Pembelian	110.314,73	Pagar Kawat Keliling Pasar Utan
165	Pagar Perumahan	03.04.01.04.001	000005	Baik	Tidak	Beton	Jl. Sultan Kaharuddin Brang Bara					Pembelian	232.648,91	Pagar Pagar buang Bara + Honorarium
166	Tugu/tanda betes lainnya	03.04.01.35.001	000001	Baik	Tidak	Tidak	Pasar Empang	14/03/2021				Pembelian	6.334,35	Pembelian Gerbang Pasar Empang
167	Tugu/tanda betes lainnya	03.04.01.35.001	000002	Baik	Tidak	Beton	pasar plambang	14/03/2021				Pembelian	4.868,51	Pembelian Gerbang Pasar Plambang (Pamalharan)
<b>Jumlah Harga</b>												<b>146.441.653,48</b>		

**MENGETAHUI**  
 Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil  
 Menengah Perindustrian dan  
 Perdagangan  
 Riki Insani, SE, M.Si  
 NIP. 19651004 193703 1 010

Sumbawa Besar, 31 Desember 2021  
 Pengurus Barang

Jufriadi

NIP. 19810727 200801 1 020



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D**  
**JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA HARAT  
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
 Bidang : Bidang Perindustrian  
 Unit Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  
 Sub Unit Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  
 U P B : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO. KODE LOKASI : 12.15.06.12.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RP)	Keterangan
		Kode Barang I.S.	Regis-ter						Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jalan Kabupaten Lokal	04.01.01.03.003	000001	Jalan				Bar Barat					Pembelian	85.400,10	Baik	Jalan Desa Pasar Rakyat Keramatan Alas Barat + Perencanaan + Pengawasan
2	Jalan Kabupaten Lokal	04.01.01.03.003	000002					Leseng					Pembelian	1.050.722,40	Baik	Jalan Inokandun SIKIM + Perencanaan + Pengawasan
3	Jembatan Penyambung Jalinan	04.01.02.10.006	000001					Leseng					Pembelian	814.485,00	Baik	perbaikan jalan, saluran dan jembatan SIKIM/Leseng
4	Solunan Drainase	04.02.04.04.002	000001					Kel. seberang					Pembelian	194.959,76	Baik	Pasar Sekeleng
5	Solunan Drainase	04.02.04.04.002	000002					Langam					Pembelian	129.400,00	Baik	Solunan Drainase Pasar Langam
6	Solunan Drainase	04.02.04.04.002	000003					Kel. Utan					Pembelian	304.228,32	Baik	Telud Pasar Utan
7	Solunan Drainase	04.02.04.04.002	000004					Brang Bara					Pembelian	49.400,00	Baik	Telud Pasar Brang Bara
8	Solunan Drainase	04.02.04.04.002	000005	Beton			137	Jl. Candawasih					Pembelian	60.000,53	Baik	Desakan Pasar Brang Bara
9	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	04.02.04.05.007	000001					Bar Barat	31/12/2018				Pembelian	48.730,00	Baik	Telud dan Gorong-gorong Pasar Alas Bara
10	Bak Penyimpanan/Tower Air Batu	04.02.06.01.003	000001					Leseng					Pembelian	492.000,00	Baik	bangunan sarana air bersih SIKIM
11	Solunan Pembuang Air Buangan Air Potolian	04.02.07.03.004	000001					Lapis perkerasan					Pembelian	16.050,00	Baik	Timbuh air kotor
12	Solunan Pembuang Air Buangan Air Potolian	04.02.07.03.004	000002			1		Pasar sekeleng					Pembelian	49.788,00	Baik	Pengadaan konstruksi Air Limbah pasar/Mulati dan DPK



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D  
JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN

13	Sekoran Pembuang Air Buangan Air Pertanian	04.02.07.03.004	000007		2	Pasar Ucan			Tanah Mlik Pemda	Pembelian	94.505,00	Baik	Pengadaan konstruksi air limbah pasar/Mutasi dari DPAK
14	Sekoran Pembuang Air Buangan Air Pertanian	04.02.07.03.004	000008		1	Pasar Langan			Tanah Mlik Pemda	Pembelian	10.000,00	Baik	Pengadaan konstruksi air limbah pasar/Mutasi dari DPAK
15	Sekoran Pembuang Air Buangan Air Pertanian	04.02.07.03.004	000009			Jl Sultan Khamuddin Bang Baka				Pembelian	200.215,00	Baik	Instalasi Pengaliran Air Limbah (PAL)
16	Sekoran Pembuang Air Buangan Air Pertanian	04.02.07.03.004	000010			Pasar Kerato	17/07/2019			Pembelian	24.950,00	Baik	Sumur Resapan Pasar Kerato
17	Sumur Cili (SCL)	04.03.01.05.001	000001			Jl. Garuda				Pembelian	16.995,00	Baik	Sumur dan UPT, Tanam dan Bekk
18	Sumur Resapan	04.03.01.05.005	000002			Pasar Empang				Pembelian	27.000,00	Baik	
19	Sumur Resapan	04.03.01.05.005	000003			Kecamatan Uten				Pembelian	114.702,85	Baik	Sumur Bor dan Instalasi Pagar Uten
20	Sumur Resapan	04.03.01.05.005	000004			Pasar Langan	14/05/2020			Pembelian	4.403,20	Baik	Sumur Resapan
21	Instalasi Air Kotor Lain-lain	04.03.02.01.004	000001		75	Pasar Ucan	19/05/2020			Pembelian	139.782,40	Baik	IPAL pasar ucan (konstruksi)
22	Instalasi Air Buangan Industri Lain-lain	04.03.02.02.004	000001			Lesang				Pembelian	455.614,00	Baik	Instalasi air buangan industri drenase/sanitasi SICH
23	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lain-lain	04.07.04.02.007	000001		400	Kec. Moyo Hulu, Lesang/UTS				Pembelian	1.005.837,85	Baik	Instalasi pengolahan air limbah (PAL) /Lesang UTS/pengawas an dan perencanaan/ta pa
24	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	04.04.01.01.002	000001			Kec. Badak			Tanah Mlik Pemda	Pembelian	7.500,00	Baik	Lapak Hentai ODA
25	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	04.04.01.01.002	000002			SRS Baga lango Lombok			Tanah Mlik Pemda	Pembelian	8.100,00	Baik	Jaringan instalasi listrik dan pemasangan lampu SRG
26	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	04.04.01.01.002	000003			SRS Baga Tencu				Pembelian	2.530,00	Baik	Instalasi Listrik
27	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	04.04.01.01.002	000004			UPT Babi/Jl Garuda				Pembelian	4.250,00	Baik	Instalasi listrik
28	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	04.04.01.01.002	000006			Dekopendag/Jl. Mangg s No.16 Krt. Umar Uma				Pembelian	12.500,00	Baik	Tan Laki Dey Kantor Dekopendag
29	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	04.04.01.01.002	000010			Dekopendag/Jl. Mangg s No.16 Uma Uma				Pembelian	15.450,00	Baik	Rehab Berap Instalasi Listrik Kantor
30	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	04.04.01.01.002	000011			UPT Babi/Jl. Garuda	31/12/2011			Pembelian	15.370,00	Baik	Instalasi Listrik



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D  
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

31	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	04.04.01.01.002	000012				Panci Gelas				Pembelian	7.500,00	Baik	Instalasi Listrik
32	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	04.04.01.01.002	000013				MCK Lapak Pertokoan				Pembelian	1.021,00	Baik	Instalasi Listrik
33	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	04.04.01.01.002	000015				Leseng				Pembelian	75.856,88	Baik	Jaringan Listrik SKM/Leseng
34	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	04.04.01.01.002	000016				Pasar Pletirpang			Tanah Milik Perca	Pembelian	1.200,00	Baik	Tambah Daya Pasar
35	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	04.04.01.01.002	000017				Pasar Empang				Pembelian	40.500,00	Baik	Instalasi Listrik
36	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	04.04.01.01.002	000018				Pasar Brang Rij				Pembelian	4.500,00	Baik	Instalasi Listrik
37	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	04.04.01.01.002	000019				Pasar Rambang				Pembelian	4.500,00	Baik	Tambah daya
38	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	04.04.01.01.002	000020				J. Sultan Kamaruddin Brang Bera	03/09/2018			Pembelian	45.163,00	Baik	Instalasi Listrik SKA Pasar Brang Bera
39	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	04.04.01.01.002	000021				Pasar Labuhan				Pembelian	8.395,00	Baik	Pemasangan Listrik dan Air
<b>Jumlah Harga</b>											6.920.095,95			

MENGETAHUI  
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil  
Menengah Perindustrian dan  
Perdagangan

Riki Diansyah S.Pd, M.Si  
NIP. 19681001 199703 1 010

Sumbawa Besar, 31 Desember 2021  
Pengurus Barang

Irfan

NIP. 19810727 201801 1 020



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E**  
**ASET TETAP LAINNYA**

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
 Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
 Bidang : Bidang Perindustrian  
 Unit Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  
 Sub Unit Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  
 U P B : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

NO. KODE LOKASI : 12.15.05.12.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Barang 1.3.	Nomor Register	Buku / Perpustakaan		Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan			Hewan/Ternak dan Tumbuhan		Jumlah	Asal usul	Tahun Cetak / Pembelian	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
				Judul/ Pencipta	Spesifikasi	Asal Daerah	Pencipta	Bahan	Jenis	Ukuran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Tanah: Kars	05.05.01.01.001	000001	-	-	-	-	-	-	-	1	Pembelian	2012	1.500,00	
<b>Jumlah Harga</b>													1.500,00		

**MENGETAHUI**  
 Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil  
 Menengah Perindustrian dan  
 Perdagangan  
 Rik Uzerati, S.E., M.Si  
 NIP. 155910121997031010



Sumbawa Besar, 31 Desember 2021  
 Pengurus Barang  
  
 NIP. 156107272006011020



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F  
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

**Provinsi** : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**Kab./Kota** : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
**Bidang** : Bidang Perindustrian  
**Unit Organisasi** : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  
**Sub Unit Organisasi** : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  
**U P B** : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

**NO. KODE LOKASI** : 12.15.06.12.01.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Bangunan (P, SP, D)	Konstruksi Bangunan		Luas (M <sup>2</sup> )	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Tgl. Bln Thn Mulai	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal-usul Pembiayaan	Nilai Kontrak (ribuan Rp)	Keterangan
			Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Tidak	Beton		Uma Sima	01/01/1900		23/12/2015			Pembelian	29.951,00	Review DTD Gedung Kantor Upt.Hidrologi
2	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1	Tidak			Sarang Uma	01/01/1900		26/11/2017			Pembelian	236.034,10	UDJ Pasar Karang Dima
3	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1	Tidak	Tidak		Lalengka	01/01/1900		06/12/2016			Pembelian	7.035,10	Perencanaan Revitalisasi Pasar Lalengka
4	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1	Tidak	Beton		pasar labangka	01/01/1900		23/12/2020			Pembelian	34.177,00	perencanaan
5	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1	Tidak	Beton		pasar ikan utan	27/08/2020		27/08/2020			Pembelian	93.715,00	Penyusunan Dokumen LUK, LPL (Perencanaan)
6	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	1	Tidak	Beton		Pasar Ikan Utan	29/08/2020		28/08/2020	Pembelian	79.750,00	Pembelian	79.750,00	Perencanaan Feasibility Studi Pasar Ikan Utan (Perencanaan)
<b>Jumlah Harga</b>												538.105,20		

**MENGETAHUI  
PENGELOLA BARANG**

Dr. H. Hasan Basri MM  
NIP. 19631228 199803 1 010

Sumbawa Besar, 31 Desember 2021  
 Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil  
 Menengah Perindustrian dan Perdagangan



Riki Triandani, S.P., M.Si  
 NIP. 19651001 199403 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2021

Provinsi : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
Bidang : Bidang Perindustrian  
Unit Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  
Sub Unit Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan  
U P B : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

KODE	NAMA BARANG
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>
<b>1</b>	<b>TANAH</b>
1.01	TANAH
<b>2</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>
2.01	ALAT BESAR
2.02	ALAT ANGKUTAN
2.03	ALAT BENKEL DAN ALAT UKUR
2.04	ALAT PERTANIAN
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
2.08	ALAT LABORATORIUM
2.09	ALAT PERSENUAAN
2.10	KOMPUTER
2.11	ALAT EKSPLORASI
2.12	ALAT PENGEBORAN
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEKURNIAH
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA
2.16	ALAT PERAGA
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI
2.18	RAMBU - RAMBU
2.19	PERALATAN OLAH RAGA
<b>3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>
3.01	BANGUNAN GEDUNG
3.02	MONUMEN
3.03	BANGUNAN MENARA
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI
<b>4</b>	<b>JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>
4.01	JALAN DAN JEMBATAN
4.02	BANGUNAN AIR
4.03	INSTALASI
4.04	JARINGAN
<b>5</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN
5.02	BARANG BERCORAK KESENITAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA
5.03	HEWAN
5.04	BIOTA PERAIRAN
5.05	TANAMAN
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI
<b>6</b>	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
<b>1.5</b>	<b>ASET LAINNYA</b>
<b>2</b>	<b>KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA</b>
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA
<b>3</b>	<b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD
<b>4</b>	<b>ASET LAIN-LAIN</b>
4.01	ASET LAIN-LAIN

### **2.2.3. Unit Kerja Yang Masih Beroperasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 Tentang kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa terdapat Unit Usaha atau unit kerja yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau melaksanakan kegiatan teknis penunjang tertentu. Di Dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa terdapat 5 (lima) UPT. Dinas yaitu

1. UPT. Kemetrolagian
2. UPT. Pasar Wilayah I
3. UPT. Pasar Wilayah II
4. UPT. Pasar Wilayah III
5. UPT. Pengembangan Tenun dan Batik

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2020**

Pada sub bagian ini, akan di sajikan dan di deskripsikan tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa periode Tahun 2016-2021 sesuai dengan indikator kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa beserta faktor-faktor yang mempengaruhi adanya gap/kesenjangan yang disajikan dalam Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 berikut ini:

Tabel T-C.23.

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

## Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021

No.	Indikator Kinerja sesuai Tusi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Koperasi Berkualitas	-	-		41%	43%	46%	50%	19,84%	30,61%	32,66%	45,28%	20,08%	19,61%	0,75	0,76	0,98	0,40	0,99
2	Persentase Pertumbuhan Omset Usaha UMKM	-	-		4%	8%	12%	16%	18%	3,42%	4,28%	9,32%	17,06%	17,78%	0,86	0,54	0,78	1,07	0,99
3	Persentase Unit Usaha IKM	-	-		5%	5%	5%	5%	3%	0,38%	0,15%	10,56%	6,63%	1,64%	0,08	0,03	2,11	1,33	0,55
4	Cakupan Informasi Harga	-	-		72,22%	72,22%	72,22%	72,22%	83,33%	72,22%	72,22%	72,22%	72,22%	83,33%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Cakupan Kemetrolgian	-	-		23%	28%	33%	38%	23,65%	45,30%	38,23%	18,95%	29,48%	32,92%	1,97	1,37	0,57	0,78	1,39

Ket.

CC=1, B=2, BB=3

Tabel T-C.24.

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

## Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021

No.	Indikator Sesuai Kewenangan PD	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Persentase Koperasi Berkualitas	221.444.762	853.038.553	810.843.433	689.262.902	271.534.753	202.891.675	754.458.941	769.655.734	671.765.290	267.532.350	0,92	0,88	0,95	0,97	0,99	4,52	6,37
2	Persentase Pertumbuhan Omset Usaha UMKM	778.687.188	1.737.817.604	1.502.223.828	492.446.960	1.288.587.576	821.492.990	1.601.384.118	1.428.839.847	467.608.219	1.252.561.917	1,05	0,92	0,95	0,95	0,97	13,10	10,49
3	Persentase Unit Usaha IKM	1.387.763.103	1.474.448.657	10.002.868.440	19.538.906.988	4.615.089.977	1.365.687.714	1.375.651.072	9.092.806.394	18.984.324.186	4.557.807.127	0,98	0,93	0,91	0,97	0,99	46,51	46,75
4	Cakupan Informasi Harga	47.653.927	130.495.842	35.987.773	3.661.003.259	249.393.132	44.701.927	120.529.889	16.095.773	3.627.270.723	246.824.087	0,94	0,92	0,45	0,99	0,99	84,67	90,43
5	Cakupan Kemetrolgian	179.260.839	388.591.014	1.783.910.050	142.056.597	94.860.175	157.262.457	338.486.939	1.705.070.852	137.986.522	72.947.585	0,88	0,87	0,96	0,97	0,77	-9,42	-10,72

Diketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat beberapa target kinerja yang tidak tercapai akibat pandemi covid-19.

- a. Persentase Koperasi Berkualitas, merupakan salah satu indikator menghasilkan rasio kinerja yaitu menghasilkan nilai rasio diatas 0,7 (nol koma tujuh) dari Tahun 2016 s.d. Tahun 2020;
- b. Persentase Pertumbuhan Omset Usaha UMKM, merupakan salah satu indikator yang belum konsisten menghasilkan rasio kinerja yang optimal, dimana dalam periode renstra 2016-2020 menghasilkan nilai rasio 0,86 (nol koma delapan enam) pada tahun 2016 dan menjadi 0.99 (nol koma sembilan sembilan) pada tahun 2020.
- c. Persentase Unit Usaha IKM, merupakan salah satu indikator yang juga belum konsisten menghasilkan rasio kinerja yang optimal, dimana dalam periode renstra 2016-2020 menghasilkan nilai rasio 0,08 (nol koma nol delapan) pada tahun 2016 dan menjadi 0.55 (nol koma enam tujuh) pada tahun 2020. Dari Tahun 2016-2018 terjadi proses verifikasi dan validasi data IKM. Di Tahun 2020 telah dilakukan reuiu target namun tetap tidak tercapai karena adanya Pandemi covid 19.;
- d. Cakupan Informasi Harga, merupakan salah satu indikator yang secara konsisten menghasilkan rasio 1 (satu) dari periode renstra 2016-2020. Indikator ini konsisten menghasilkan rasio kinerja yang baik dari tahun pertama sampai dengan tahun akhir dari periode renstra 2016-2020 yaitu konstan pada nilai rasio 1 (satu);
- e. Cakupan Kemetrolgian, merupakan salah satu indikator yang juga belum konsisten menghasilkan rasio kinerja yang optimal, dimana dalam periode renstra 2016-2020 menghasilkan nilai rasio diatas 1 (satu) pada tahun 2016-2017 karena kewenangan tera/tera ulang masih menjadi kewenangan provinsi. Pada Tahun 2018-2019 mengalami penurunan nilai rasio dibawah 1 (satu) karena keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan dalam melakukan tera/tera ulang UTTP.

Selanjutnya berdasarkan Tabel T-C.24 seluruh anggaran yang teralokasikan dalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa ditujukan untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditentukan. selanjutnya dengan melakukan perbandingan antara jumlah alokasi dengan jumlah realisasi dapat disajikan analisis terhadap rasio tersebut, yaitu:

- a. Persentase Koperasi Berkualitas, merupakan salah satu indikator menghasilkan rasio kinerja yaitu menghasilkan nilai rasio diatas 0,9 (nol koma sembilan) dari Tahun 2018 s.d. Tahun 2020;
- b. Persentase Pertumbuhan Omset Usaha UMKM, merupakan salah satu indikator yang belum konsisten menghasilkan rasio kinerja yang optimal, dimana dalam periode renstra 2016-2020 menghasilkan nilai rasio 0,9 (nol koma sembilan).
- c. Persentase Unit Usaha IKM, merupakan salah satu indikator yang yang menghasilkan rasio kinerja yang optimal, dimana dalam periode renstra 2016-2020 menghasilkan nilai rasio 0,9 (nol koma sembilan)
- d. Cakupan Informasi Harga, merupakan salah satu indikator yang secara konsisten menghasilkan rasio 0,9 (nol koma sembilan) dari periode renstra 2016-2020.
- e. Cakupan Kemetrolagian, merupakan salah satu indikator yang juga belum konsisten menghasilkan rasio kinerja yang optimal, dimana dalam periode renstra 2016-2020 menghasilkan nilai rasio 0,9 (nol koma sembilan) pada tahun 2016 dan mengalami penurunan nilai rasio menjadi 0,77 (nol koma tujuh tujuh) pada tahun 2020. Kondisi tersebut disebabkan ada anggaran yang tidak terealisasi karena pandemi covid-19.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa**

Sebagai sebuah organisasi perangkat daerah, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa memiliki sejumlah tantangan dan peluang untuk mengembangkan kualitas atau kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat. Dalam periode Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa sebelumnya (Tahun 2016-2020) teridentifikasi beberapa hal yaitu :

1. Adanya kekosongan beberapa jabatan karena purna tugas
2. Gedung UPT. Kemetrolagian belum terbangun
3. Belum tersedianya gudang arsip
4. Rumah jaga bagi penjaga malam belum tersedia
5. Penumbuhan Unit Usaha Industri belum mencapai target

Sehingga berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk periode Renstra selanjutnya yaitu periode Tahun 2021-2026.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian terhadap jumlah jenis pelayanan/penyelenggaraan tugas dan fungsi, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Hal itu sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa; dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa dan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Koperasi Usah Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun kedepan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Sumbawa, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa melakukan orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2024. Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan.

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan tugas dan fungsi telah disinkronisasikan dengan hasil identifikasi permasalahan daerah pada sub urusan penunjang. Maka berbagai permasalahan pelayanan dan penyelenggaraan tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa serta faktor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dengan memperhatikan hasil isian Tabel T-B.35 Tahun 2021-2026, seperti dibawah ini:

**TABEL T-B.35**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah,**  
**Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1	Pelaksanaan Pembangunan Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan belum optimal yang dipengaruhi belum optimalnya tata kelola koperasi, UMKM, Industri dan perdagangan hal ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat sejahtera dan mandiri melalui peningkatan pendapatan dan nilai tambah sektor industri dan perdagangan	Rendahnya profesionalisme dalam pengelolaan koperasi	Jumlah koperasi tiap tahun cenderung menurun
		Perkembangan UMKM masih rendah	Masih kurangnya akses permodalan UKM
		Masih rendahnya akses pasar	Belum berkembangnya ekonomi kreatif
		Masih rendahnya kemampuan IKM dan Pelaku IKM	Produktifitas sektor industri Kabupaten Sumbawa masih rendah
			Daya saing sektor industri Kabupaten Sumbawa terhadap kab/kota lainnya di NTB rendah
			Daya tarik investasi di sektor industri masih rendah
		Tata kelola sektor perdagangan masih belum optimal	Disorientasi kebijakan dan program pengembangan sektor perdagangan
			Kerentanan terhadap perubahan kondisi yang tak terduga
			Belum tersedianya sarana dan prasarana kemetrolgian
			Belum optimalnya pemanfaatan Sistem resi Gudang (SRG)
Masih terbatasnya penataan dan pemberdayaan PKL			
2	Peningkatan Kualitas pelayanan kepada Masyarakat/pelaku usaha yang masih kurang	Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang	kurangnya peningkatan kualitas melalui pelatihan bagi Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan pelayanan menuju terciptanya pelayanan prima dan <b>good governance</b>

Keterangan :

- 1 Rumusan Masalah Pokok yang bersifat makro bagi daerah, yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran
- 2 Rumusan Masalah bersifat spesifik dan dipecahkan melalui strategi
- 3 Rumusan Akar Masalah dengan mencari penyebab masalah secara rinci dan diselesaikan dengan pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum

Uraian masalah pokok pada Tabel T-B.35 dalam RPJMD di atas merupakan Perumusan Masalah yang bersifat makro bagi daerah yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Uraian masalah merupakan perumusan masalah yang ditentukan dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik dan dipecahkan atau diselesaikan melalui pilihan-pilihan strategi. Uraian akar masalah merupakan perumusan akar masalah yang ditentukan dengan mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci dan dipecahkan/diselesaikan melalui pilihan arah kebijakan atau kebijakan umum.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dengan mempertimbangan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Sumbawa dan berdasarkan penelaahan terhadap dokumen rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Sumbawa serta hasil identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Sumbawa maka dibutuhkan perumusan visi Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai pedoman arah kebijakan lima tahun mendatang. Visi ini dibuat untuk menentukan fokus dan arah gerak Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam bekerja menuntaskan isu-isu yang ada dan meminimalisir potensi permasalahan di masa mendatang.

#### **3.2.1 Visi**

Visi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa pada pembangunan Kabupaten Sumbawa periode 2021-2026 adalah **“Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban”**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka maksud dari pokok-pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel : III. 1

Pejabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Periode 2021 s.d 2026

<b>Visi</b>	<b>Pokok-pokok visi</b>	<b>Penjelasan Visi</b>
<b>Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban</b>	Sumbawa gemilang	<ul style="list-style-type: none"> <li>SUMBAWA GEMILANG; mengandung makna Kabupaten Sumbawa yang memiliki daya saing kuat serta mampu berkompetisi baik ditingkat regional, nasional maupun internasional</li> </ul>
	Sumbawa berkeadaban	<ul style="list-style-type: none"> <li>BERKEADABAN; mengandung makna masyarakat Sumbawa yang memegang teguh agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari (Adat Barenti Ko Sara', Sara' Barenti Ko Kitabullah. Taket Ko Nene, Kangila Boat Lenge) sehingga terbentuk kondisi kehidupan yang "Senap Semu" (dimensi kesejahteraan spritual); "Riam Remo" (dimensi kesejahteraan sosial) yaitu gambaran suasana masyarakat yang penuh dengan kedamaian, persahabatan dan rasa kekeluargaan dalam menjalankan kehidupannya sebagai warga negara), "Nyaman Nyawe" (kesejahteraan ekonomis) merupakan gambaran kondisi masyarakat yang berkecukupan.</li> </ul>

### 3.2.2 Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi. Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tanggung jawab suatu daerah/organisasi/lembaga yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Adapun misi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa pada pembangunan Kabupaten Sumbawa periode 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Misi pertama : SUMBAWA SEHAT DAN CERDAS

Misi kedua : SUMBAWA SEJAHTERA DAN MANDIRI

- Misi ketiga : SUMBAWA BERSIH DAN MELAYANI  
Misi keempat : SUMBAWA AMAN DAN BERBUDAYA  
Misi kelima : SUMBAWA TANGGUH DAN BERKELANJUTAN

Tanggung jawab organisasi/lembaga dalam hal ini perangkat daerah melekat secara utuh di dalam tugas pokok dan fungsinya. Berkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, harus mengacu dan relevan dengan pencapaian Misi Kabupaten Sumbawa sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu misi kedua yaitu “**Sumbawa Sejahtera Dan Mandiri**” dengan penjelasannya sebagai tabel III 2.

Tabel : III 2  
Penjelasan Misi

NO	MISI	RUMUSAN PENJELASAN MISI
1	SUMBAWA SEHAT DAN CERDAS	Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daerah yang maju melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan.
2	SUMBAWA SEJAHTERA DAN MANDIRI	Mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan nilai tambah sektor agribisnis, industri dan pariwisata.
3	SUMBAWA BERSIH DAN MELAYANI	Menciptakan birokrasi pemerintahan yang bersih (anti Korupsi), cepat dan bermutu, memberikan kepastian serta pelayanan yg cepat dan efisien.
4	SUMBAWA AMAN DAN BERBUDAYA	Mewujudkan masyarakat yang beriman, berkeadilan, terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum dan terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.
5	SUMBAWA TANGGUH DAN BERKELANJUTAN	Pengembangan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim melalui pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Dari penjabaran visi dan misi di atas, misi ke 2 (dua) yaitu: “**Sumbawa Sejahtera dan Mandiri**”, merupakan visi yang menjadi amanat bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya, karena dalam misi tersebut menyangkut bagaimana menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Sumbawa untuk menciptakan “Perekonomian yang Berdaya Saing”. Adapun sasaran serta strategi dan arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut :

Tabel III.3  
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD  
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021–2026  
terkait Urusan Koperasi dan UKM, Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan

<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Peningkatan nilai tambah produk lapangan usaha prioritas	Peningkatan nilai tambah produk lapangan usaha prioritas
2. Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Prioritas	1. Peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa	1. Peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa
	2. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	2. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
	3. Peningkatan kuantitas UMKM	3. Peningkatan kuantitas UMKM
	4. Peningkatan kuantitas IKM	4. Peningkatan kuantitas IKM
3. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	1. Penerapan budaya kerja birokrasi yang melayani, bersih dan akuntabel	1. Implementasi Zona Integritas, WWBM, WWBK
	2. Penerapan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang jelas, efektif, efisien terukur dan sesuai dengan prinsip <i>Good Governance</i>	2. Penguatan Implementasi SOP dan Standar Pelayanan Publik
	3. Peningkatan kualitas SDM aparatur yang terintegrasi dan netral	3. Peningkatan Indeks profesionalitas ASN
	4. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	4. Penguatan AKIP Perangkat Daerah

Arah kebijakan pembangunan koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sumbawa 5 (lima) tahun ke depan tahun 2021-2026 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel : III.4  
Arah kebijakan pembangunan koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan  
Kabupaten Sumbawa tahun 2021-2026

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa	Peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa
2	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
3	Peningkatan kuantitas UKM	Peningkatan kuantitas UKM
4	Peningkatan kuantitas IKM	Peningkatan kuantitas IKM
5	Penerapan budaya kerja birokrasi yang melayani, bersih dan akuntabel	Implementasi Zona Integritas, WWBM, WWBK
6	Penerapan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang jelas, efektif, efisien terukur dan sesuai dengan prinsip <i>Good Governance</i>	Penguatan Implementasi SOP dan Standar Pelayanan Publik
7	Peningkatan kualitas SDM aparatur yang terintegrasi dan netral	Peningkatan Indeks profesionalitas ASN
8	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Penguatan AKIP Perangkat Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, berikut ini disajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Faktor-faktor yang disebutkan dibawah ini nantinya kemudian akan bahan perumusan isu strategis pelayanan dan/atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa sebagaimana tabel sebagai berikut ;

**Tabel T-B-35b**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b><i>VISI Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban</i></b>				
<b>No</b>	<b>Misi KDH dan Wakil KDH</b>	<b>Permasalahan Pelayanan OPD</b>	<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
1	Sumbawa Sejahtera dan Mandiri	Keterbatasan jangkauan pelayanan yang tidak sebanding dengan luasnya target sasaran dan hanya lebih ke sifat memfasilitasi pelayanan yang relatif tergantung ketersediaan pihak lain.	Kurangnya kuantitas SDM bidang Koperasi	Database koperasi
			Database UMKM belum valid	Peran strategis usaha mikro di dalam perekonomian masyarakat
			Masih rendahnya kesadaran pengusaha industri dalam menyampaikan laporan usaha industri sehingga mengurangi keakuratan data industri.	Tersedianya Sistem informasi industri
			Belum tersusunnya RIPIK	Dalam Proses penyusunan RIPIK
			Belum tersedianya data perdagangan secara lengkap	Komitmen dalam meningkatkan sistem informasi perdagangan
			Sarana metrologi masih kurang representative	Dukungan kementerian perdagangan
2	Sumbawa Bersih dan Melayani	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dalam menerapkan prinsip bersih dan melayani	Belum optimalnya efisiensi, efektivitas serta akuntabilitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan	Peningkatan kualitas SDM melalui bimtek

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa merujuk pada Renstra Kementerian Koperasi dan UKM, Renstra Kementerian Perindustrian, dan Renstra Kementerian Perdagangan, serta dengan memperhatikan Renstra Perangkat Daerah Provinsi NTB yaitu Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan.

Telaahan terhadap rencana strategis kementerian dan rencana strategis OPD teknis di tingkat provinsi ditujukan untuk melakukan sinergitas dan sinkronisasi antar level nasional, provinsi dan kabupaten terkait dengan tujuan dan sasaran strategis pembangunan jangka menengah tahun 2019-2024.

#### 3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM RI

Tujuan dan sasaran strategis pembangunan jangka menengah Koperasi dan UMKM tahun 2020-2024 yang ingin dicapai sebagai suatu outcome dan impact dari program yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024.

##### a. Tujuan

NO	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang maju dan modern	Modernisasi koperasi	a. 5000 – 1000 koperasi model baru b. 5% – 10% koperasi berinovasi dan memanfaatkan teknologi
		Melahirkan wirausaha baru	a. 3,55% – 3,95% rasio kewirausahaan nasional b. 700 – 3500 start-up berbasis koperasi
2	Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global	Integrasi UMKM dalam global value chains (GVC)	7 komoditas ekspor UMKM
		UMKM naik kelas	0,5% usaha mikro naik kelas
3	Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UMKM yang profesional dan berkinerja tinggi	Indeks reformasi birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM	A
		Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Koperasi dan UKM	A

b. Sasaran.

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang maju dan modern	Meujudkan Koperasi Generasi berdaulat, mandiri maju dan modern	a. Persentase kontribusi PDB sektor koperasi b. Jumlah koperasi model baru dan modern c. Pertumbuhan start-up berbasis koperasi
2	Terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestic dan global	Mewujudkan UMKM yang berdaulat dan mampu bersaing di pasar domestic dan global	a. Persentase kontribusi PDB sektor UMKM b. Persentase total nilai ekspor UMKM c. Persentase total investasi ekspor UMKM d. Persentase UMKM naik kelas e. Persentase tenaga kerja UMKM f. Rasio kewirausahaan
3	Terwujudna Kementerian Koperasi dan UMKM yang professional dan berkinerja tinggi	Menediakan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM yang efektif	Indeks kepuasan masyarakat terhadap program/kegiatan pengembangan koperasi edn UMKM
		Menyelenggarakan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM melalui program/kegiatan yang efektif, efisien, bermanfaat dan berkelanjutan	Indeks kualitas kebijakan pengembangan koperasi edn UMKM
		Menyelenggarakan pengendalian pengawasan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pengembangan koperasi dan UMKM
		Mewujudkan profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UKM	Indeks profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UKM
		Mewujudkan system data dan informasi pengembangan koperasi dan UMKM yang terintegrasi	Kualitas integrasi data dan informasi pengembangan koperasi dan UMKM

	Mewujudkan tata kelola pemerintah Kementerian koperasi dan UMKM yang baik	a. Indeks reormasi birokrasi b. Tingkat maturitas SPIP dan kapabilitas PIP
	Mewujudkan akuntabilitas kinerja dan anggaran Kementerian koperasi dan UMKM yang baik	c. Nilai akuntabilitas d. Opini BPK

c. Strategi dan Arah Kebijakan.

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Mengembangkan sentra dan kluster Meningkatkan akumulasi, aksesibilitas dan kemampuan permodalan	Peningkatkan mutu pengelolaan (management), proses produksi UMKM dan IKM
2. pengembangan UMKM unggulan berbasis ekonomi kreatif	Peningkatkan jaminan mutu produk-produk UMKM dan IKM
3. Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM pelaku usaha / UKM	Pegembangan Desain dan Kemasan produk-produk UKM dan IKM
4. Meningkatkan mutu, sertifikasi maupun standarisasi mutu proses, produksi dan produk KUKM-IKM	Pengembangan Legailitas Hak Cipta
5. Pengembangan ciri khas/ keunikan produk	Peningkatan pendampingan dan pembinaan dalam mengembangkan ciri khas / keunikan produk

**3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian RI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai:

a. Tujuan.

Tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional“. Pencapaian tujuan secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator kinerja tujuan yang juga menjadi indikator kinerja utama,

Indikator Kinerja Tujuan

NO	URAIAN	2020	2024
1	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	5,3	8,4
2	Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	17,8	18,9

3	Tenaga Kerja di Sektor Industri (Juta Orang)	19,2	22,5
4	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (US\$ Miliar)	133,1	1816

b. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian 2020 - 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas”	<p>a. Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15 persen menjadi sebesar 15,7 persen pada tahun 2024.</p> <p>b. Produktivitas tenaga kerja sektor industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 111,8 Juta/Orang/Tahun menjadi sebesar Rp. 124,7 Juta/Orang/Tahun pada tahun 2024.</p> <p>c. Produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan antara 1,99 menjadi sebesar 2,15 pada tahun 2024.</p> <p>d. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 256,3 Triliun menjadi Rp. 769,1 Triliun pada tahun 2024.</p> <p>e. Persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 15 persen hasil riset menjadi sebesar 30 persen hasil riset pada tahun 2024.</p> <p>f. Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan pada tahun 2020 sebesar 75 persen menjadi sebesar 88 persen pada tahun 2024.</p> <p>g. Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi pada tahun 2020 sebanyak 36.000 orang menjadi sebanyak 157.000 orang pada tahun 2024.</p>
2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i> ,”	<p>a. Perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)</i> <math>\geq 3.0</math> pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 30 perusahaan menjadi sebesar 60 perusahaan pada tahun 2024.</p> <p>b. Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi pada tahun 2020</p>

		<p>c. Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi pada tahun 2020 sebanyak 20 IKM menjadi sebanyak 260 IKM pada tahun 2024.</p> <p>d. Sumber daya manusia industri 4.0 yang kompeten pada tahun 2020-2024 setiap tahun sebanyak 500 orang.</p>
3	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri”	<p>a. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang) pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 49 persen menjadi sebesar 53 persen pada tahun 2024.</p> <p>b. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 46,63 persen menjadi sebesar 52,48 persen pada tahun 2024.</p> <p>c. Produk tersertifikasi TKDN <math>\geq</math> 25% yang masih berlaku pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 6.200 produk tersertifikasi menjadi sebanyak 8.400 produk tersertifikasi pada tahun 2024.</p> <p>d. d. Persentase SNI bidang industri yang diterapkan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5 persen menjadi sebesar 20 persen pada tahun 2024.</p>
4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri”	<p>a. Pertumbuhan ekspor industri pengolahan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,3 persen menjadi sebesar 10,1 persen pada tahun 2024.</p> <p>b. Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 74,3 persen menjadi sebesar 76,5 persen pada tahun 2024.</p> <p>c. Rasio impor bahan baku industri terhadap PDB sektor industri nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 37,8 persen menjadi sebesar 36,8 persen pada tahun 2024.</p> <p>d. d. Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 27 persen menjadi sebesar 32 persen pada tahun 2024.</p>
5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)”	<p>a. Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 18,60 persen menjadi sebesar 20 persen pada tahun 2024.</p>

		<p>b. Wirausaha industri kecil yang tumbuh pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 4.000 wirausaha baru (WUB) menjadi sebanyak 20.000 WUB pada tahun 2024.</p> <p>c. IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 50 IKM menjadi sebanyak 340 WUB pada tahun 2024.</p> <p>d. Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM pada tahun 2020 sebesar 2,4 persen menjadi sebesar 5 persen pada tahun 2024.</p>
6	Meningkatnya Persebaran Industri”	<p>a. Kawasan industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 11 KI menjadi sebanyak 17 KI pada tahun 2024.</p> <p>b. KI yang dikembangkan pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 18 KI menjadi sebanyak 33 KI pada tahun 2024.</p> <p>c. Fasilitasi KI dengan zona tematik (kawasan halal) pada tahun 2024 ditargetkan telah ada 3 KI.</p> <p>d. Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa sebesar 29,9 persen pada tahun 2020 menjadi sebesar 33,1 persen pada tahun 2024.</p> <p>e. Sentra industri kecil dan menengah</p> <p>f. (SIKIM) di luar Jawa yang beroperasi pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 17 sentra menjadi sebanyak 44 sentra pada tahun 2024.</p>
7	Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif	<p>efektifitas kebijakan industri pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 72 persen menjadi 80 persen pada tahun 2024.</p>
8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”	<p>Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 33 perusahaan menjadi</p>
9	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan	<p>a. Batas toleransi temuan pengawasan eksternal pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 1,5 persen menjadi sebesar 1 persen pada tahun 2024.</p>

	Efisien”	b. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker ditargetkan sebesar 91 persen menjadi sebesar 93 persen pada tahun 2024. Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan pada level 3 menjadi level 4 pada tahun 2024.
10	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 70 menjadi sebesar 80 pada tahun 2024. ASN yang meningkat kompetensinya pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 500 orang menjadi 700 orang pada tahun 2024.
11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas	Tersedianya data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan (skala 4) pada tahun 2020 sebesar skala 3 menjadi skala 3,18 pada tahun 2024. Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik pada tahun 2020 ditargetkan selalu 100 persen pada tahun 2020-2024.
12	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”	a. Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN selalu ditargetkan memperoleh WTP mulai tahun 2020 sampai tahun 2024. b. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 78 menjadi sebesar 80 pada tahun 2024.
13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan, serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	a. Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional ditargetkan sebesar 95,5 persen tahun 2020 menjadi 97,5 persen pada tahun 2024. b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian ditargetkan sebesar 78 tahun 2020 menjadi 80 pada tahun 2024.

### 3.3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan RI

Tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai pada urusan perdagangan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

#### a. Tujuan

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa;
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas

b. Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa	Neraca perdagangan (USD milyar)	15
		Pertumbuhan ekspor rill barang dan jasa	6,2%
		Pertumbuhan ekspor barang non migas	9,8%
		Rasio ekspor jasa terhadap PDB; dan	30%
		PTA/FTA/CEPA yang disepakati	40
2	Terwujudnya Stabilisasi Harga Dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok	inflasi pangan bergejolak	3,1%
3	Terwujudnya Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab	Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN)	55
4	Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor (%)	60%
		Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional (%)	95%
5	Optimalnya Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)	Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (%)	15%
		Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan (%)	14%
		Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas (%)	10%
6	Meningkatnya Kinerja Perdagangan Yang Bersih, Akuntabel Dan Profesional		

7	Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan		
---	--	--	--

### 3.3.4. Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB

Sasaran pembangunan koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Tahun 2019-2023 ditetapkan berdasarkan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan Koperasi yang Berdaya Saing
2. Meningkatkan Kapasitas pelaku Usaha Kecil dan Menengah

Adapun hubungan antara Tujuan dan Sasaran pembangunan sektor Koperasi dan UKM Provinsi NTB Tahun 2019-2023 serta indikator dan targetnya setiap tahun disajikan pada tabel berikut :

#### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET RPJMD 2019-2023				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Koperasi dan UKM yang unggul	Meningkatnya Koperasi yang Modern dan Berdaya Saing  Meningkatnya Kapasitas pelaku usaha Kecil dan Menengah	Pertumbuhan KUKM (%) - Pertumbuhan Koperasi Modern - Prosentase KSP/USP yang menerapkan Pola Syariah - Prosentase Usaha Kecil menjadi Wirausaha Mapan			0,40  15  12,6  3,01	0,40  15  18,89  4,21	0,40  15  25,31  4,82

Berdasarkan data tersebut di atas maka Sasaran atau indikator sasaran pembangunan urusan koperasi dan UMKM pada Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa sudah selaras dengan sasaran pembangunan koperasi dan UMKM pada Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB.

### 3.3.5. Telaahan Renstra Dinas Perdagangan Prov. NTB

Telaahan sasaran dan indikator sasaran pembangunan di bidang perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui renstra Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat jangka waktu Tahun 2019-2023.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas  
Perdagangan Provinsi NTB**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terjaganya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok		Inflasi	3-4%	3-4%	3-4%	3-4%	3-4%
		Meningkatnya pengendalian Perdagangan Dalam Negeri	Inflasi Bahan Makanan	2%	2%	2	2	2
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan di dalam PDRB		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Perdagangan	6%	-5%	-2%	2%	5%
		Meningkatnya dan berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri, Luar Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Nilai Transaksi Perdagangan	11.000.000 (dalam ribu)	11.500.000 (dalam ribu)	12.000.000 (dalam ribu)	12.500.000 (dalam ribu)	13.000.000 (dalam ribu)
			Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	3%	5%	7%	9%	11%

Berdasarkan sasaran pembangunan perdagangan Renstra Dinas Perdagangan Prov. NTB di atas maka dapat disimpulkan Sasaran pembangunan di urusan perdagangan pada Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Kabupaten Sumbawa telah selaras pada indikator dan tsrget kinerja sasaran.

**3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sumbawa**

Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sumbawa oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa dilaksanakan dengan memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa.

### **3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa merupakan hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sumbawa ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sumbawa. dokumen tersebut menjadi arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan pada setiap sector. Dokumen RTRW Kabupaten Sumbawa saat ini yang masih berlaku ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW 2011-2031. Regulasi ini tengah dalam proses legislasi perubahan dan akan mengalami perubahan perodesasi menjadi RTRW Kabupaten Sumbawa Tahun 2018-2038.

Memperhatikan tujuan dari adanya kebijakan penataan ruang wilayah di Kabupaten Sumbawa, maka kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan dukungan terhadap kebijakan Bupati dan Wakil Bupati untuk mewujudkan ruang wilayah agribisnis, pariwisata dan pertambangan yang memenuhi kebutuhan pembangunan berdasarkan keunggulan komparatif, berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, efisien dalam alokasi investasi, produktif, aman, nyaman dan bersinergi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa selaku Organisasi Perangkat Daerah harus mampu memastikan kebijakan penataan ruang wilayah yang dinyatakan oleh Bupati dan Wakil Bupati dapat terlaksana, dimana Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sumbawa terdiri atas:

- a) pengembangan kawasan yang berbasis pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- b) pengembangan kawasan yang berbasis peternakan, kelautan dan perikanan, dan pulau pulau kecil;
- c) pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya;
- d) pengembangan kawasan potensi pertambangan yang ekonomis dengan memperhatikan aspek lingkungan;

- e) peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agribisnis dan pariwisata;
- f) pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung kegiatan agribisnis, pariwisata dan pertambangan;
- g) pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi;
- h) penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, perikanan dan pariwisata dan pertambangan; dan
- i) pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup melalui kajian lingkungan hidup strategis.

Selain beberapa kebijakan penataan ruang di atas, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa juga memiliki tugas untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati yang menetapkan beberapa Kawasan strategis, baik kawasan strategis yang ditetapkan provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa maupun Kawasan strategis lainnya, yang meliputi:

- a) Kawasan Agropolitan Alas Utan dari sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata;
- b) Kawasan Lingkar Tambang Batu Hijau dan Dodo Rinti dari sector unggulan pertambangan, pertanian dan pariwisata;
- c) Kawasan Minapolitan Teluk Saleh dan sekitarnya dari sector unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan industri; dan
- d) Kawasan Ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini

Maka untuk itu, selain memberikan kajian dan pertimbangan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa juga bertugas memberikan informasi dan pertimbangan kepada pimpinan daerah terkait dengan upaya dan tindakan pengendalian atas pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Sumbawa, yang meliputi:

- a) Ketentuan umum peraturan zonasi;
- b) Ketentuan perizinan;
- c) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d) Arahan penganan sanksi

### 3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sumbawa

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pembangunan berkelanjutan itu sendiri merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dokumen kajian KLHS RPJMD Kabupaten Sumbawa, menyebutkan sejumlah rekomendasi yang harus menjadi perhatian Bersama terhadap berbagai indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang belum mencapai target dengan memperhatikan isu-isu strategis, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta potensi dampak dan resiko lingkungan. Indikator TPB/SDGs yang menjadi materi kajian dalam KLHS dikelompokkan dalam 4 (empat) pilar, yaitu:

- (1). Pilar Pembangunan Sosial (mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5);
- (2). Pilar Pembangunan Ekonomi (mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17);
- (3). Pilar Pembangunan Lingkungan (mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15); dan
- (4). Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (mencakup Tujuan 16).

Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Sumbawa, beberapa Rekomendasi dimaksud juga selanjutnya dibagi penyajiannya dalam pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan dan pilar hukum dan tata kelola, yaitu:

#### 1. Pilar Sosial

Pilar ini memiliki **97 indikator** Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan terdapat **14 indikator** yang belum mencapai target, yaitu:

- 1) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
- 2) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat
- 3) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat

- 4) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15 – 49 tahun yang berstatus kawin
- 5) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/program keluarga harapan
- 6) Persentase anak umur 12 – 23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap
- 7) Persentase merokok pada penduduk umur > 15 tahun
- 8) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN
- 9) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan
- 10) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
- 11) Prevalensi penyalahgunaan narkoba
- 12) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta
- 13) Rata-rata lama sekolah penduduk umur  $\geq 15$  tahun
- 14) Total Fertility Rate (TFR)

## **2. Pilar Ekonomi**

Pada pilar ekonomi ini terdapat 55 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan terdapat 11 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang belum tercapai, yaitu:

- 1) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur;
- 2) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik;
- 3) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama;
- 4) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS);
- 5) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- 6) Jumlah wisatawan mancanegara;
- 7) Laju pertumbuhan PDB per kapita;
- 8) PDB per kapita;
- 9) Persentase tenaga kerja formal;
- 10) Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur; dan

11) Tingkat setengah pengangguran.

Dilihat dari kondisi jasa ekosistem jenis penyedia pangan, penyedia air, tempat tinggal dan ruang hidup, serta jasa ekosistem jenis pengatur tata aliran air dan banjir yang keseluruhannya berada pada kategori Sangat rendah-rendah yang dianalisis terhadap indikator-indikator pada pilar ekonomi, serta memperhatikan dampak dan resiko lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam, perubahan iklim dan keanekaragaman hayati, dapat dirumuskan alternatif dan rekomendasi terhadap indikator indikator pilar ekonomi.

### **3. Pilar Lingkungan**

Pada pilar lingkungan ini, terdapat 71 indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dan yang belum mencapai target sebanyak 22 indikator. dimana indikator belum mencapai target pada pilar lingkungan sebanyak 5 indikator dan satu indikator bukan menjadi kewenangan langsung Pemerintah Kabupaten Sumbawa, sehingga analisis dalam penyusunan alternatif dan rekomendasi dilakukan pada empat indikator yang menjadi kewenangan langsung Kabupaten Sumbawa.

### **4. Hukum dan Tata Kelola**

Pilar Hukum dan Tata Kelola ini hanya memiliki 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB 16 yaitu Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua Tingkatan. Indikator tujuan dalam pilar ini memiliki 21 indikator dan 2 indikator diantaranya yang belum tercapai targetnya yaitu,

- a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK); dan
- b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Pejabat Eselon I dan II).

Hasil analisis terhadap kondisi di atas, menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus mempertimbangkan upaya kebijakan alternatif terhadap pencapaian target indikator yang belum tercapai.

## **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

### **3.5.1 Metoda Penentuan Isu-Isu Strategis**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang. Isu strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa di masa lima tahun mendatang.

### **3.5.2 Hasil Penentuan Isu –Isu Strategis**

Melalui pencermatan terhadap tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaah visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah renstra OPD Propinsi dan telaah Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dapat diidentifikasi isu isu strategis yang dihadapi dalam pengembangan Koperasi UMK, Industri dan Perdagangan adalah :

1. Penguatan kelembagaan, pengawasan koperasi dan UMKM
2. Peningkatan SDM Koperasi dan UMKM
3. Kewenangan pembinaan UKM
4. Kebijakan pusat tentang perubahan aturan dan kelembagaan pelayanan perizinan
5. Kualitas data sektor perdagangan
6. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan tertib ukur serta standarisasi produk

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap RTRW Kabupaten Sumbawa yang disajikan pada bagian sebelumnya, maka teridentifikasi bahwa RTRW Kabupaten Sumbawa tersebut berimplikasi bagi pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa. Demikian juga berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen KLHS Kabupaten Sumbawa yang disajikan pada bagian sebelumnya, maka teridentifikasi bahwa hasil KLHS RPJMD Kabupaten Sumbawa tersebut berimplikasi bagi pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu pengarusutamaan yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, adalah sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Secara konsep, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan, yang saling terkait termasuk kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 telah mengarusutamakan sebanyak 118 (seratus delapan belas) target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Uraian di atas, merupakan suatu tantangan dan tuntutan bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala daerah agar dapat mengimplementasikan kebijakannya khususnya untuk mencapai suatu kondisi terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, dengan menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa harus memperhatikan berbagai rekomendasi dalam dokumen RTRW dan KLHS sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi pada RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi pada RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Tujuan, sasaran beserta indikator yang disebutkan pada Tabel T-C.25 berikut merupakan bentuk pernyataan bahwa Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa memastikan akan berkontribusi terhadap indikator-indikator sasaran pemerintah daerah yang berkesuaian.

**Tabel T-C.25.**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan/Pelaksanaan Tugas/Fungsi/Kewenangan  
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan OPD	Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / sasaran pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan jumlah Sisa Hasil Usaha Koperasi dan Omzet UMKM, Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Prioritas sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan serta Nilai Reformasi Birokrasi		Nilai Reformasi Birokrasi	51,32	51,91	52,50	55,00	57,50
		Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kategori Nilai AKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	BB	BB	A	A	A
2	Meningkatkan jumlah Sisa Hasil Usaha Koperasi dan Omzet UMKM, Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Prioritas sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan serta Nilai Reformasi Birokrasi		Laju jumlah Omzet koperasi dan usaha mikro	8,55%	10,63%	13,23%	16,43%	20,30%
		Meningkatnya jumlah Omzet Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Omzet koperasi dan Usaha Mikro	Rp.181.288.857.000	Rp.200.557.709.000	Rp.227.085.598.000	Rp.264.398.357.000	Rp.318.060.960.000

3	Meningkatkan jumlah Sisa Hasil Usaha Koperasi dan Omzet UMKM, Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Prioritas sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan serta Nilai Reformasi Birokrasi		Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Prioritas sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan	1,442 %	1,868 %	2,295 %	2,721 %	3,147 %
		Meningkatnya Nilai PDRB sektor perdagangan dan industri pengolahan	Nilai PDRB sektor perdagangan	2.419.389.860 .000 (Rp)	2.429.696.460 .000 (Rp)	2.440.046.960 .000 (Rp)	2.450.441.560 .000 (Rp)	2.460.880.440 .000 (Rp)
			Nilai PDRB sektor industri pengolahan	281.413.550. .000 (Rp)	282.612.370 .000 (Rp)	283.816.300 .000 (Rp)	285.025.360 .000(Rp)	286.239.570 .000 (Rp)

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Strategi didefinisikan sebagai suatu langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sementara itu, Arah Kebijakan dimaksudkan sebagai suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan Strategis merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan kedalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa yang merupakan penjabaran dari wewenang, misi, visi, maupun nilai-nilai yang akan diserap menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan ke dalam program-program.

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis Perangkat Daerah merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD tahun 2021-2026 dan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

**Tabel T-C.26.**

**Hubungan antara Visi, Misi KDH/WKDH dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa**

<b>Visi</b>	:	<b>Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban</b>		
<b>Misi 3</b>	:	<b>Sumbawa Sejahtera dan Mandiri</b>		
<b>Misi 2</b>	:	<b>Sumbawa Bersih dan Melayani</b>		
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Sub. Urusan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	1	Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Optimalisasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kewenangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				2 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				3 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				4 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Kepegawaian Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				5 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Umum Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

<b>Visi</b>	:	<b>Sumbawa Gemilang yang Berkeadaban</b>		
<b>Misi 3</b>	:	<b>Sumbawa Sejahtera dan Mandiri</b>		
<b>Misi 2</b>	:	<b>Sumbawa Bersih dan Melayani</b>		
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
				6 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				7 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
				8 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		2 Meningkatnya jumlah omzet Koperasi dan Usaha Mikro	Modernisasi manajemen koperasi untuk meningkatkan Kualitas kelembagaan dan mengembangkan usaha koperasi melalui penumbuhan dan pengembangan koperasi modern dan pemberdayaan koperasi	Peningkatan ketatalaksanaan kelembagaan dan akuntabilitas koperasi Meningkatkan dan mengembangkan usaha koperasi simpan pinjam melalui penumbuhan dan pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) koperasi Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengembangan Diklat Peningkatan pengembangan akses koperasi terhadap sistem informasi bisnis dan pengembangan pemasaran

<b>Misi 2</b>		<b>: Sumbawa Bersih dan Melayani</b>	
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
		Mendorong UMKM menjadi wirausaha	Peningkatan Fasilitasi UMKM dalam mendapatkan legalitas usaha
			Peningkatan pengembangan usaha UMKM
			Pendataan UMKM yang akurat
	3 Meningkatnya Nilai PDRB sektor perdagangan dan industri pengolahan	Memperkuat dan memperluas akses pasar dalam dan luar negeri	Peningkatan akses dan penetrasi ke pasar melalui pengembangan pemasaran
		Melayani kualitas layanan pasar	Peningkatan SDM pengelola Pasar
			Penyediaan sarana dan prasarana pasar yang refresentatif
			Perbaikan tata kelola pasar melalui perbaikan SOP Pasar
			Perbaikan tata kelola pasar melalui peningkatan kualitas tata kelola keuangan pasar antara lain dilakukan dengan tata kelola BLUD
		Meningkatkan Kemampuan IKM dan Pelaku IKM	Peningkatan produktivitas dan penguasaan teknologi industri bagi industri kecil dan standarisasi produk industri
			Peningkatkan jaminan mutu dan kapasitas produksi IKM

Sesuai dengan kebijakan strategis di atas, pembangunan sektor Koperasi dan UMKM perindustrian dan perdagangan diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk tercapainya masyarakat Kabupaten Sumbawa yang semakin sejahtera dalam aspek-aspek sebagai berikut:

**1. Aspek Ekonomis**

Pembangunan sektor koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Sumbawa harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan materiil bagi masyarakat luas secara adil dan merata serta lebih memantapkan implementasi Otonomi Daerah.

**2. Aspek Kultural**

Pembangunan koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Sumbawa harus mampu ikut membangun karakter budaya daerah yang kondusif dalam rangka terwujudnya masyarakat yang modern dan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa.

**3. Aspek Teknologis**

Pembangunan koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Sumbawa harus mampu menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi masyarakat di bidang teknologi dan manajemen sebagai ujung tombak pembentukan daya saing wilayah menghadapi era globalisasi.

**4. Aspek Kelembagaan**

Pembangunan sektor koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan harus mampu membangun kapasitas antara lembaga/institusi pembina sektor koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan dengan sektor-sektor lainnya yang secara sinergis dapat mendorong daya saing dan kemandirian wilayah.

**5. Aspek Perencanaan**

Pembangunan sektor koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan harus mampu merumuskan perencanaan kebijakan dan program yang memiliki arah dan sasaran yang jelas dan berbasis ekonomi kerakyatan.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa program merupakan suatu penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Regulasi di atas dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah.

**Tabel T-C. 27**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif**  
**Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Tahun 2026		PENANGGUNG JAWAB
					Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024		Th 2025		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	3	5	15	16	17	18	19	20	12								
		<b>Meningkatkan kinerja penyelenggaraan sub urusan Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Nilai Reformasi Birokrasi</b>	<b>Nilai</b>	<b>51,32</b>	<b>51,91</b>	<b>52,50</b>	<b>55,00</b>	<b>57,50</b>	<b>60,01</b>							
		<b>Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>	<b>Kategori Nilai AKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>Kategori</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>					<b>Kepala Dinas</b>		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	nilai	79,50	5.133.433.246	74,15	6.004.539.000	80,10	6.682.052.000	80,20	9.663.606.000	80,30	8.287.617.000	80,30	7.987.617.000	Sekretaris Dinas
		• Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9,00	37.167.000	9,00	25.009.000	9,00	26.966.000	9,00	73.000.000	9,00	76.000.000	9,00	76.000.000	
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2,00	12.578.000	1,00	8.474.000	1,00	14.691.000	1,00	24.000.000	1,00	25.000.000	1,00	25.000.000	
		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1,00	10.386.000	1,00	4.199.000	1,00	2.314.000	1,00	12.000.000	1,00	12.000.000	1,00	12.000.000	
		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00	1.785.000	1,00	1.884.000	1,00	1.566.000	1,00	4.000.000	1,00	4.000.000	1,00	4.000.000	
		- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00	1.985.000	1,00	2.389.000	1,00	2.909.000	1,00	4.000.000	1,00	4.000.000	1,00	4.000.000	
		- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,00	2.123.000	1,00	1.473.000	1,00	2.049.000	1,00	4.000.000	1,00	4.000.000	1,00	4.000.000	
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1,00	1.863.000	1,00	2.500.000	1,00	2.257.000	1,00	3.000.000	1,00	3.000.000	1,00	3.000.000	
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2,00	6.447.000	3,00	4.090.000	3,00	1.180.000	3,00	22.000.000	3,00	24.000.000	3,00	24.000.000	
		• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	22	4.558.013.000	22	5.607.344.000	22	6.151.006.000	22	6.285.170.000	22	6.354.251.000	22	6.354.251.000	
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	62,00	4.463.219.000	63,00	5.547.440.000	65,00	6.064.225.000	67,00	6.121.270.000	69,00	6.178.851.000	69,00	6.178.851.000	
		- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	81.299.000	12,00	51.225.000	12,00	66.051.000	12,00	147.900.000	12,00	157.900.000	12,00	157.900.000	
		- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1,00	2.499.000	1,00	2.457.000	1,00	1.688.000	1,00	3.000.000	1,00	3.500.000	1,00	3.500.000	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Tahun 2026		PENANGGUNG JAWAB
					Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024		Th 2025		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	3	5	15	16	17	18	19	20	12								
		- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1,00	1.999.000	1,00	935.000	1,00	12.832.000	1,00	2.500.000	1,00	2.500.000	1,00	2.500.000	
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	2.499.000	1,00	805.000	1,00	1.604.000	1,00	3.000.000	1,00	3.500.000	1,00	3.500.000	
		- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	2.000.000	1,00	1.912.000	1,00	1.667.000	1,00	2.250.000	1,00	2.250.000	1,00	2.250.000	
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	13,00	2.499.000	13,00	960.000	13,00	1.479.000	13,00	3.000.000	13,00	3.500.000	13,00	3.500.000	
		- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2,00	1.999.000	2,00	1.610.000	2,00	1.460.000	2,00	2.250.000	2,00	2.250.000	2,00	2.250.000	
		• Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	3	1.995.000	3	1.998.000	-	-	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	
		- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	996.000	1	998.000	-	-	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	
		- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	999.000	2	1.000.000	-	-	2	1.500.000	2	1.500.000	2	1.500.000	
		• Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Target Pendapatan Daerah Kewenangan PD	Rupiah	-	-	-	-	-	-	3.700.000.000	15.500.000	3.900.000.000	15.500.000	3.900.000.000	15.500.000	
		- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1,00	6.720.000	1,00	6.720.000	1,00	6.720.000	
		- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1,00	8.780.000	1,00	8.780.000	1,00	8.780.000	
		• Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1,00	1.996.000	1,00	35.639.000	1,00	44.000.000	1,00	45.000.000	1,00	45.000.000	1,00	45.000.000	
		- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	1.996.000	1,00	35.639.000	1,00	44.000.000	1,00	45.000.000	1,00	45.000.000	1,00	45.000.000	
		• Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	4,00	85.391.396	4,00	69.352.000	4,00	75.630.000	4,00	102.000.000	4,00	112.500.000	4,00	112.500.000	
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	2.502.000	1,00	2.984.000	1,00	3.031.000	1,00	3.000.000	1,00	3.500.000	1,00	3.500.000	
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	9.884.000	1,00	10.667.000	1,00	3.659.000	1,00	15.000.000	1,00	15.000.000	1,00	15.000.000	
		- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1,00	7.269.396	1,00	6.510.000	1,00	12.247.000	1,00	12.000.000	1,00	12.000.000	1,00	12.000.000	
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	65.736.000	1,00	49.191.000	1,00	56.693.000	1,00	70.000.000	1,00	80.000.000	1,00	80.000.000	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1,00	2.000.000	1,00	2.000.000	1,00	2.000.000	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Tahun 2026		PENANGGUNG JAWAB
					Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024		Th 2025		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	3	5	15	16	17	18	19	20	12								
		• Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	Dokumen	1,00	60.783.000	1,00	26.724.000	1,00	4.093.000	1,00	2.155.000.000	1,00	515.000.000	1,00	215.000.000	
		- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2,00	7.177.000	5,00	7.739.000	1,00	4.093.000	3,00	15.000.000	3,00	15.000.000	3,00	15.000.000	
		- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5,00	53.606.000	8,00	18.985.000	-	-	2,00	30.000.000	2,00	30.000.000	2,00	30.000.000	
		- Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	4,00	60.000.000	4,00	120.000.000	4,00	120.000.000	
		- Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	1,00	50.000.000	
		- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	1,00	2.000.000.000	-	-	-	-	
		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	300.000.000	-	-	
		• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	2,00	79.298.000	2,00	146.465.000	2,00	207.280.000	2,00	447.996.000	2,00	470.071.000	2,00	470.071.000	
		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	891,00	7.103.000	689	3.013.000	-	-	760	6.500.000	760	6.500.000	760	6.500.000	
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3,00	72.195.000	3,00	143.452.000	3,00	207.280.000	3,00	441.496.000	3,00	463.571.000	3,00	463.571.000	
		• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	1,00	308.789.850	1,00	92.008.000	1,00	173.077.000	1,00	536.940.000	1,00	696.295.000	1,00	696.295.000	
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2,00	36.985.000	2,00	54.340.000	2	71.070.000	2	74.980.000	2	83.987.000	2	83.987.000	
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6,00	49.496.000	6,00	27.415.000	6	49.229.000	6	72.360.000	6	81.045.000	6	81.045.000	
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	19,00	13.151.000	16,00	10.253.000	-	-	16,00	16.600.000	16,00	17.763.000	16,00	17.763.000	
		- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1,00	5.128.850	-	-	-	-	1	8.000.000	1	8.500.000	1	8.500.000	
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	204.029.000	-	-	1,00	52.778.000	2,00	280.000.000	2,00	380.000.000	2,00	380.000.000	
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	-	1,00	85.000.000	1,00	125.000.000	1,00	125.000.000	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Tahun 2026		PENANGGUNG JAWAB
					Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024		Th 2025		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	3	5	15	16	17	18	19	20	12								
		<b>Meningkatkan kinerja penyelenggaraan sub urusan Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Laju jumlah omzet koperasi dan usaha mikro</b>	%	<b>8,55</b>		<b>10,63</b>		<b>13,23</b>		<b>16,43</b>		<b>20,30</b>		<b>24,82</b>		
		Meningkatnya jumlah omzet Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah omzet koperasi dan Usaha Mikro	Rupiah	181.288.857.000		200.557.709.000		227.085.598.000		264.398.357.000		318.060.960.000		318.060.960.000		
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase pelayanan izin usaha simpan pinjam	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM	
		• Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		• Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	%	40,61	39.475.000	39,33	13.459.000	40,16	14.003.000	41,29	30.000.000	43,07	40.000.000	43,07	40.000.000	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM
		• Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	37,88	39.475.000	17,92	13.459.000	20,76	14.003.000	21,74	30.000.000	22,65	40.000.000	22,65	40.000.000	
		- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	100,00	39.475.000	50,00	13.459.000	60,00	14.003.000	65,00	30.000.000	70,00	40.000.000	70,00	40.000.000	
		- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kab/Kota Kinerja	Unit Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Tahun 2026		PENANGGUNG JAWAB
					Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024		Th 2025		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	3	5	15	16	17	18	19	20	12								
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP kategori sehat	%	11,67	11.856.000	16,67	845.000	-	-	25,00	20.000.000	29,17	30.000.000	29,17	30.000.000	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM
		• Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Persentase KSP/Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	11,67	11.856.000	16,67	845.000	-	-	25,00	20.000.000	29,17	30.000.000	29,17	30.000.000	
		- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	14,00	11.856.000	20,00	845.000	-	-	30,00	20.000.000	35,00	30.000.000	35,00	30.000.000	
		- Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	32,20	412.497.000	34,05	399.844.000	36,33	406.770.000	38,46	420.000.000	40,45	430.000.000	40,45	430.000.000	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM
		• Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	1,62	412.497.000	1,94	399.844.000	2,28	406.770.000	2,61	420.000.000	2,95	430.000.000	2,95	430.000.000	
		- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	674,00	412.497.000	818,00	399.844.000	998	406.770.000	1.142	420.000.000	1.286	430.000.000	1.286	430.000.000	
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase jumlah koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan	%	39,92	99.103.000	40,32	120.914.000	40,68	15.000.000	41,03	120.000.000	41,34	130.000.000	41,34	130.000.000	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM
		• Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Jumlah koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	%	20,17	99.103.000	21,74	120.914.000	22,81	15.000.000	23,81	120.000.000	24,73	130.000.000	24,73	130.000.000	
		- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	48,00	99.103.000	55,00	120.914.000	60,00	15.000.000	65,00	120.000.000	70,00	130.000.000	70,00	130.000.000	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Tahun 2026		PENANGGUNG JAWAB
					Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024		Th 2025		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	3	5	15	16	17	18	19	20	12								
		Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	15,71	485.528.000	15,83	2.513.813.000	15,95	137.200.000	16,06	260.000.000	16,17	290.000.000	16,17	290.000.000	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM
		• Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase usaha mikro yang difasilitasi melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	%	8,83	485.528.000	12,35	2.513.813.000	9,01	137.200.000	9,83	260.000.000	10,04	290.000.000	10,04	290.000.000	
		- Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah data potensi dan pengembangan usaha mikro	Dokumen	1,00	-	1,00	2.207.069.000	-	-	1	20.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
		- Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	277,00	-	292,00	-	-	15	20.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000		
		- Fasilitasi kemudahan perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	50,00	28.262.000	100,00	580.000	-	-	100	20.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	
		- Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	170,00	457.266.000	190,00	306.164.000	30	137.200.000	50	200.000.000	70	200.000.000	70	200.000.000	
		- Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Program pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Pengembangan Usaha	%	5,05	1.406.351.000	6,40	1.413.173.000	7,75	2.077.385.000	9,09	683.382.000	10,40	717.728.000	10,40	717.728.000	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM
		• Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha	Unit	835,00	1.406.351.000	1.095	1.413.173.000	1.365	2.077.385.000	1.645	683.382.000	1.935	717.728.000	2.235	717.728.000	
		- Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	233,00	1.406.351.000	260,00	1.413.173.000	270,00	2.077.385.000	280	683.382.000	290	717.728.000	300	717.728.000	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDKATOR KINERJA	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Tahun 2026		PENANGGUNG JAWAB
					Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024		Th 2025		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	3	5	15	16	17	18	19	20	12								
		<b>Meningkatkan kinerja penyelenggaraan sub urusan Koperasi,UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan RB</b>	<b>Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Prioritas sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan</b>	%	1,442		1,868		2,295		2,721		3,147		3,147		
		<b>Meningkatnya Nilai PDRB sektor perdagangan dan industri pengolahan</b>	<b>Nilai PDRB sektor perdagangan</b>	(Rp)	2.419.389.860.000		2.429.696.460.000		2.440.046.960.000		2.450.441.560.000		2.460.880.440.000		2.460.880.440.000		
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko Swalayan)	%	-	-	64,67	6.434.000	78,57	4.915.000	86,36	30.000.000	94,74	40.000.000	94,74	40.000.000	Kepala Bidang Perdagangan
		• Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin pengelolaan pasar rakyat, izin pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		• Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase rekomendasi Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	%	-	-	100	6.434.000	100	4.915.000	100	30.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	
		- Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	-	-	2,00	6.434.000	2,00	4.915.000	2,00	30.000.000	2,00	40.000.000	2,00	40.000.000	
		• Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase rekomendasi STPW yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		• Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri	Persentase rekomendasi STPW yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk Penerima waralaba dari waralaba luar negeri	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Tahun 2026		PENANGGUNG JAWAB
					Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024		Th 2025		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	3	5	15	Rp.	16	Rp.	17	Rp.	18	Rp.	19	Rp.	20	Rp.	12		
		- Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		• Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		• Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- Pemeriksaan Penyimpanan Bahan berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- Fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		• Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Persentase penerbitan SKA sesuai ketentuan	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	%	20,00	2.417.202.000	30,00	1.516.430.000	50,00	1.349.508.000	70,00	1.900.000.000	90,00	1.950.000.000	90,00	1.950.000.000	Kepala Bidang Pasar
		• Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang disediakan/ diadakan/ dikelola	Unit	10,00	794.089.000	10,00	30.367.000	10,00	4.865.000	10,00	100.000.000	10,00	150.000.000	10,00	150.000.000	
		- Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	2,00	794.089.000	3,00	30.367.000	5,00	4.865.000	7,00	100.000.000	9,00	150.000.000	9,00	150.000.000	
		- Fasilitasi Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		• Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di	Jumlah Pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat yang dibina	Unit	3,00	1.623.113.000	3,00	1.486.063.000	3,00	1.344.643.000	3,00	1.800.000.000	3,00	1.800.000.000	3,00	1.800.000.000	
		- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	3,00	1.623.113.000	3,00	1.486.063.000	3,00	1.344.643.000	3,00	1.800.000.000	3,00	1.800.000.000	3,00	1.800.000.000	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Tahun 2026		PENANGGUNG JAWAB
					Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024		Th 2025		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	3	5	15	16	17	18	19	20	12								
		- Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting	Jumlah laporan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Laporan	1,00	29.580.000	1,00	72.190.000	1,00	36.990.000	1,00	136.000.000	1,00	155.000.000	1,00	155.000.000	Kepala Bidang Perdagangan
		• Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Daerah	Laporan	1,00	24.581.000	1,00	430.000	-	-	1,00	20.000.000	1,00	30.000.000	1,00	30.000.000	
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1,00	24.581.000	1,00	430.000	-	-	1,00	20.000.000	1,00	30.000.000	1,00	30.000.000	
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		• Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tingkat Pasar di Daerah	Laporan	12,00	4.999.000	12,00	560.000	12,00	4.980.000	12,00	50.000.000	12,00	55.000.000	12,00	55.000.000	
		- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12,00	4.606.000	12,00	0	12,00	0	12,00	30.000.000	12,00	35.000.000	12,00	35.000.000	
		- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	-	-	1,00	560.000	1,00	4.980.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	
		- Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
		• Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah	Laporan	-	-	2,00	71.200.000	2,00	32.010.000	2,00	66.000.000	2,00	70.000.000	2,00	70.000.000	
		- Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	-	-	2,00	71.200.000	2,00	32.010.000	2,00	66.000.000	2,00	70.000.000	2,00	70.000.000	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Tahun 2026		PENANGGUNG JAWAB
					Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024		Th 2025		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	3	5	15	16	17	18	19	20	12								
		Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor daerah	Rp	1.000.000.000	25.877.000	156.800.000.000	2.749.000	0	-	4.000.000.000	90.000.000	5.000.000.000	90.000.000	5.000.000.000	90.000.000	Kepala Bidang Perdagangan
		• Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah	Laporan	1,00	25.877.000	1,00	2.749.000	-	-	1,00	90.000.000	1,00	90.000.000	1,00	90.000.000	
		- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan kabupaten / kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Pameran dagang nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	1,00	19.832.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Pameran dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Misi dagang bagi produk ekspor unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	1,00	6.045.000	5,00	2.749.000	-	-	5,00	90.000.000	5,00	90.000.000	5,00	90.000.000	
		- Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Produk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Program Standarisasi dan perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	36,67	102.039.000	26,04	26.241.000	31,25	26.620.000	36,46	74.000.000	36,46	74.000.000	36,46	74.000.000	Sekretaris Dinas
		• Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	%	36,67	102.039.000	26,04	26.241.000	31,25	26.620.000	36,46	74.000.000	36,46	74.000.000	36,46	74.000.000	
		- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera dan Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	352,00	88.125.000	250,00	25.439.000	300,00	26.620.000	350,00	74.000.000	350,00	74.000.000	350,00	74.000.000	
		- Pengawasan / penyuluhan metrologi	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	1,00	13.914.000	2,00	802.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Laporan	1,00	12.638.000	1,00	3.980.000	-	-	1,00	40.000.000	1,00	60.000.000	1,00	60.000.000	Kepala Bidang Perdagangan
		• Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah laporan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Laporan	1,00	12.638.000	1,00	3.980.000	-	-	1,00	40.000.000	1,00	60.000.000	1,00	60.000.000	
		- Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten / kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	1,00	12.638.000	1,00	3.980.000	-	-	2,00	40.000.000	2,00	60.000.000	2,00	60.000.000	
		- Pemasaran dan Peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten / kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Peningkatan sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Tahun 2026		PENANGGUNG JAWAB
					Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024		Th 2025		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	3	5	15	16	17	18	19	20	12								
	<b>Meningkatnya Nilai PDRB sektor perdagangan dan industri pengolahan</b>	<b>Nilai PDRB sektor industri pengolahan</b>	<b>(Rp)</b>		<b>281.413.550.000</b>	<b>282.612.370.000</b>	<b>283.816.300.000</b>	<b>285.025.360.000</b>	<b>286.239.570.000</b>	<b>286.239.570.000</b>							
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah dokumen capaian kinerja Perencanaan dan Pembangunan Industri Kabupaten yang disusun	Dokumen	1,00	4.553.925.000	1,00	3.437.557.000	1,00	4.299.205.000	1,00	4.420.000.000	1,00	4.630.000.000	1,00	4.630.000.000	Kepala Bidang Perindustrian	
	• Penyusunan, Penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten / kota	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	Dokumen	2,00	4.553.925.000	1,00	3.437.557.000	1,00	4.299.205.000	1,00	4.420.000.000	1,00	4.630.000.000	1,00	4.630.000.000		
	- Penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1,00	99.865.000	1,00	580.000	-	-	1,00	20.000.000	1,00	30.000.000	1,00	30.000.000		
	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen														
	- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1,00	221.671.000	1,00	547.482.000	1,00	1.118.595.000	1,00	1.200.000.000	1,00	1.200.000.000	1,00	1.200.000.000		
	- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen														
	- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1,00	4.232.389.000	1,00	2.889.495.000	1,00	3.180.610.000	1,00	3.200.000.000	1,00	3.400.000.000	1,00	3.400.000.000		
	- Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen														
	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten / kota	Persentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	%	100,00	83.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kepala Bidang Perindustrian	
	• Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan fasilitasi/ koordinasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten	Dokumen	1,00	83.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	1,00	83.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Tahun 2026		PENANGGUNG JAWAB
					Th 2021		Th 2022		Th 2023		Th 2024		Th 2025		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	3	5	15	16	17	18	19	20	12								
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Data Informasi Industri Kewenangan Kabupaten di SIINas	%	1,14	0	1,32	11.600.000	1,62	11.000.000	1,87	14.000.000	2,09	14.000.000	2,09	80.000.000	Kepala Bidang Perindustrian
		• Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Unit	10,00	-	15,00	11.600.000	20,00	11.000.000	25,00	14.000.000	30,00	14.000.000	30,00	80.000.000	
		- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kab/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kab/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	-	-	1,00	11.600.000	1,00	11.000.000	1,00	14.000.000	1,00	14.000.000	1,00	14.000.000	
		- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten / Kota dalam penyampaian data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indikator. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ditetapkan sebagai acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan. Indikator Kinerja Utama dapat ditampilkan dalam Tabel T-C.28 berikut ini:

Tabel T-C.28

**Indikator Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa  
(Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026)**

No.	Indikator Tujuan PD (x), Indikator Sasaran PD (xx), Indikator Program (xxx)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
<b>1</b>	<b>Nilai Reformasi Birokrasi</b>	-	Nilai	51,32	51,91	52,50	55,00	57,50	60,01
<b>1.1</b>	<b>Kategori Nilai AKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</b>	BB	Kategori	BB	BB	A	A	A	A
<b>1.1.1</b>	Nilai AKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	79,40	Nilai	79,50	74,15	80,10	80,20	80,30	80,30
<b>2</b>	<b>Laju Jumlah Omzet Koperasi dan Usaha Mikro</b>	6,27	%	8,55	10,63	13,23	16,43	20,30	24,82
<b>2.1</b>	<b>Jumlah omzet koperasi dan Usaha Mikro</b>	167.015.028 .277	Rp.	181.288.857 .000	200.557.709 .000	227.085.598 .000	264.398.357 .000	318.060.960 .000	318.060.960 .000
2.1.1	Persentase pelayanan izin usaha simpan pinjam	-	%	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Persentase Koperasi Yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	34,98	%	40,61	39,33	40,16	41,29	43,07	43,07
2.1.3	Persentase KSP/USP kategori sehat	5,83	%	11,67	16,67	0	25,00	29,17	29,17
2.1.4	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	34,90	%	32,20	34,05	36,33	38,46	40,45	40,45
2.1.5	Persentase jumlah koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan	20,52	%	39,92	40,32	40,68	41,03	41,34	41,34
2.1.6	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	14,06	%	15,71	15,83	15,95	16,06	16,17	16,17
2.1.7	Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha	3,86	%	5,05	6,40	7,75	9,09	10,40	10,40
<b>3</b>	<b>Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Prioritas sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan</b>	-1,558	%	1,442	1,868	2,295	2,721	3,147	3,147
<b>3.1</b>	<b>Nilai PDRB sektor perdagangan</b>	2.348.922.190 .000	(Rp)	2.419.389.860. 000	2.429.696.460 .000	2.440.046.960 .000	2.450.441.560 .000	2.460.880.440 .000	2.460.880.440 .000
3.4.1	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat	86,35	%	-	64,67	78,57	86,36	94,74	94,74

	Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko Swalayan)								
3.4.2	Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik	-	%	20,00	30,00	50,00	70,00	90,00	90,00
3.4.3	Jumlah laporan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	-	Laporan	1	1	1	1	1	1
3.4.5	Nilai Ekspor Daerah	-	(Rp)	1.000.000.000	156.800.000.000	0	4.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
3.4.6	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	33,26	%	36,67	26,04	31,25	36,46	36,46	36,46
3.4.7	Jumlah Laporan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	-	Laporan	1	1	0	1	1	1
<b>3.2</b>	<b>Nilai PDRB sektor industri pengolahan</b>	<b>273.217.040.000</b>	<b>(Rp)</b>	<b>281.413.550.000</b>	<b>282.612.370.000</b>	<b>283.816.300.000</b>	<b>285.025.360.000</b>	<b>286.239.570.000</b>	<b>286.239.570.000</b>
3.2.1	Jumlah dokumen capaian kinerja Perencanaan dan Pembangunan Industri Kabupaten yang disusun	1,00	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3.2.2	Persentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100	%	100	-	-	-	-	-
3.2.3	Persentase Data Informasi Industri Kewenangan Kabupaten di SIINas	-	%	1,14	1,32	1,62	1,87	2,09	2,09

**Tabel VII.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa**

NO	TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET KINERJA						PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026 (Kondisi akhir)			
1	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Sub. Urusan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kategori Nilai AKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	BB	BB	A	A	A	A	AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem AKuntabilitas Kinerja Pemerintah. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut,apreseasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Kategori Nilai Evaluasi AKIP	LHE AKIP Tahun n
		Meningkatnya jumlah omzet Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Omzet Koperasi dan Usaha Mikro	181.288.857.000	200.557.709.000	227.085.598.000	264.398.357.000	318.060.960.000	318.060.960.000	Omzet Koperasi dan Usaha Mikro adalah gabungan sejumlah nilai total dari penjualan produk koperasi dan Usaha Mikro pada tahun n	Jumlah omzet koperasi dan Usaha Mikro tahun n	Laporan hasil pelaksanaan program kegiatan Bidang Koperasi dan UKM

		Meningkatnya Nilai PDRB sektor perdagangan dan industri pengolahan	Nilai PDRB sektor perdagangan	2.419.389.860.000	2.429.696.460.000	2.440.046.960.000	2.450.441.560.000	2.460.880.440.000	2.460.880.440.000	Nilai Produk Domestik Regional Bruto sektor perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan tahun n	Laporan hasil pelaksanaan program kegiatan Bidang Perdagangan
			Nilai PDRB sektor perindustrian pengolahan	281.413.550.000	282.612.370.000	283.816.300.000	285.025.360.000	286.239.570.000	286.239.570.000	Nilai Produk Domestik Regional Bruto sektor perindustrian	Nilai PDRB sektor perindustrian tahun n	Laporan hasil pelaksanaan program kegiatan Bidang Perindustrian

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana strategis Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa 2021 – 2026 merupakan suatu acuan dan program dasar pemberdayaan koperasi UMKM, perindustrian dan perdagangan yang mempunyai fleksibilitas dalam pelaksanaannya sehingga pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan koperasi UMKM, perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Sumbawa. Untuk mendukung rencana tersebut di atas, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas, standar pelayanan minimal dan merupakan pengembangan tugas urusan Koperasi dan UKM urusan perindustrian dan urusan perdagangan maupun visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Merujuk kepada tujuan penyusunan Renstra yaitu membuat suatu dokumen perencanaan yang memberikan pedoman arah pembangunan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa menjadi landasan maupun pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa yang didasarkan pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa dan pertimbangan perubahan dan atau perkembangan yang terjadi setiap tahun anggaran. Dengan demikian, penjabaran Renstra ke dalam Renja maupun dokumen perencanaan lainnya bersifat dinamis sesuai dengan RKPD yang ditetapkan.

Renstra Perubahan ini juga sebagai pedoman untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja serta penyusunan LKjIP Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa.

Dengan tersusunnya rencana strategis perubahan ini, diharapkan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai.





**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

*Jalan Manggis No. 16 Telp. (0371) 21870 Sumbawa Besar*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 118.1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS  
KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUMBAWA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tim penyusun rencana strategis perubahan perangkat daerah ditetapkan dengan keputusan kepala dinas;
- b. bahwa berdasarkan tata cara klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah pada lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa tentang Rencana Strategis Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Sumbawa Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 66 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa;
  - b. menyiapkan dan menghimpun data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
  - c. menyusun rancangan Renstra Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa;
  - d. membahas rancangan Renstra Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
  - e. menyusun rancangan Renstra Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa berdasarkan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021- 2026;
  - f. menyampaikan rancangan Renstra Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi keselarasannya dengan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
  - g. menyampaikan rancangan Renstra Perubahan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa yang telah diperbaiki atau disempurnakan kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal September 2022

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN  
KABUPATEN SUMBAWA,



Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar
5. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN  
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SUMBAWA  
TAHUN 2021-2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pasar Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa	Anggota	
7.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa	Anggota	
8.	Lalu Istiwan, SP/ NIP. 19660518 199103 1 011/ Fungsional Perencana Madya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa	Anggota	
9.	Sukarni Astuti, ST/ NIP.19820802 201001 2 037/ Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa	Anggota	

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN SUMBAWA,

  
RIKI TRISNADI

## CASCADING PERUBAHAN DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2021-2026

<b>VISI RPJMD</b>	<b>Sumbawa Gemilang yang berkeadaban</b>														
<b>MISI RPJMD</b>	<b>Sumbawa Bersih melayani</b>														
<b>TUJUAN RPJMD</b>	<b>Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi</b>														
INDIKATOR TUJUAN RPJMD	Persentase Peningkatan Nilai RB														
<b>SASARAN RPJMD</b>	<b>Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi</b>														
INDIKATOR SASARAN RPJMD	Persentase Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi														
<b>TUJUAN PD</b>	<b>Meningkatkan kinerja penyelenggaraan sub urusan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan RB</b>														
INDIKATOR TUJUAN	Nilai Reformasi Birokrasi														
<b>SASARAN PD</b>	<b>Meningkatnya hasil penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>														
INDIKATOR SASARAN	Kategori Nilai AKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan														
<b>PROGRAM</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM/PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>														
INDIKATOR PROGRAM	Nilai AKIP Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan														
<b>KEGIATAN</b>	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
INDIKATOR KEGIATAN	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
<b>SUB KEGIATAN</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
INDIKATOR SUB KEGIATAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran



								<b>Sumbawa Gemilang yang berkeadaban</b>					
								<b>Sumbawa Sejahtera dan Mandiri (2)</b>					
								<b>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkualitas</b>					
								Pertumbuhan ekonomi					
								<b>Meningkatnya Kapasitas Koperasi dan UMKM</b>					
								Laju Peningkatan Jumlah Omzet Koperasi dan UMKM					
								<b>Meningkatkan kinerja penyelenggaraan sub urusan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan RB</b>					
								Laju jumlah omzet koperasi dan usaha mikro					
								<b>Meningkatnya jumlah omzet Koperasi dan Usaha Mikro</b>					
								Jumlah omzet koperasi dan Usaha Mikro					
								<b>Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</b> Persentase pelayanan izin usaha simpan pinjam		<b>Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi</b> Persentase Koperasi Yang Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)			
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	
<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</b>	<b>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>	<b>Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kab/ Kota Kinerja		

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Persentase KSP/USP kategori sehat		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Persentase jumlah koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan	Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha						Program pengembangan UMKM Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Pengembangan Usaha
Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota		Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten / kota	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan						Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil
Persentase KSP/Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persentase Jumlah koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase usaha mikro yang difasilitasi melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan						Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha
Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten / Kota	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Pemberdayaan peningkatan Produktivitas, Nilai tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Fasilitasi kemudahan perizinan Usaha Mikro	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi
Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah data potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

<b>Sumbawa Gemilang yang berkeadaban</b>										
<b>Sumbawa Sejahtera dan Mandiri (2)</b>										
<b>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkualitas</b>										
Pertumbuhan ekonomi										
<b>Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha prioritas</b>										
Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Prioritas sektor perdagangan dan industri pengolahan										
<b>Meningkatkan kinerja penyelenggaraan sub urusan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan RB</b>										
Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Prioritas sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan										
<b>Meningkatnya Nilai PDRB sektor perdagangan dan industri pengolahan</b>										
Nilai PDRB sektor perdagangan										
<b>Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</b>										
Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko Swalayan)										
<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<b>Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri</b>		<b>Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri</b>		<b>Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat</b>	<b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/ Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)</b>	
Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin pengelolaan pasar rakyat, izin pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	Persentase rekomendasi Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Persentase rekomendasi STPW yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri		Persentase rekomendasi STPW yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk Penerima waralaba dari waralaba luar negeri		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbayu di tingkat daerah Kab/Kota		Persentase penerbitan SKA sesuai ketentuan	
<b>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</b>	<b>Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<b>Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik</b>	<b>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri</b>	<b>Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri</b>	<b>Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri</b>	<b>Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C</b>	<b>Pemeriksaan Penyimpanan Bahan berbahaya</b>	<b>Fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2</b>	<b>Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA</b>
Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal

Program peningkatan sarana distribusi perdagangan Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik				Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Jumlah laporan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting								
Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten / Kota			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Jumlah sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang disediakan/ diadakan/ dikelola		Jumlah Pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat yang dibina		Jumlah Laporan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Daerah			Jumlah Laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tingkat Pasar di Daerah			Jumlah laporan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah		
Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan pasar Rakyat	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan pasar Rakyat	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan pasar Rakyat	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi
Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%

Program Pengembangan Ekspor Nilai ekspor daerah						Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Jumlah Laporan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		
Penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten / kota						Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri		
Jumlah laporan penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah						Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan			Jumlah laporan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri		
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan kabupaten / kota	Pameran dagang nasional	Pameran dagang Lokal	Misi dagang bagi produk ekspor unggulan	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera dan Tera Ulang	Pengawasan / penyuluhan metrologi	Penyidikan Metrologi Legal	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten / kota	Pemasaran dan Peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten / kota	Peningkatan sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

<b>Sumbawa Gemilang yang berkeadaban</b>										
<b>Sumbawa Sejahtera dan Mandiri (2)</b>										
<b>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkualitas</b>										
Pertumbuhan ekonomi										
<b>Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha prioritas</b>										
Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Prioritas sektor perdagangan dan industri pengolahan										
<b>Meningkatkan kinerja penyelenggaraan sub urusan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan RB</b>										
Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Prioritas sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan										
<b>Meningkatnya Nilai PDRB sektor perdagangan dan industri pengolahan</b>										
Nilai PDRB sektor industri										
<b>Program perencanaan dan pembangunan industri</b> Jumlah dokumen capaian kinerja Perencanaan dan Pembangunan Industri Kabupaten yang disusun						<b>Program pengendalian izin usaha industri kabupaten / kota</b> Persentase Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan		<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b> Persentase Data Informasi Industri Kewenangan Kabupaten di SIINas		
Penyusunan, Penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten / kota						Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota		
Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA						Jumlah dokumen pelaksanaan fasilitasi/koordinasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten		Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota		
<b>Penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten / Kota</b>	<b>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri</b>	<b>Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri</b>	<b>Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana industri</b>	<b>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</b>	<b>Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</b>	<b>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>	<b>Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten / Kota melalui SIINas</b>	<b>Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten / Kota dalam penyampaian data ke SIINas</b>
Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas